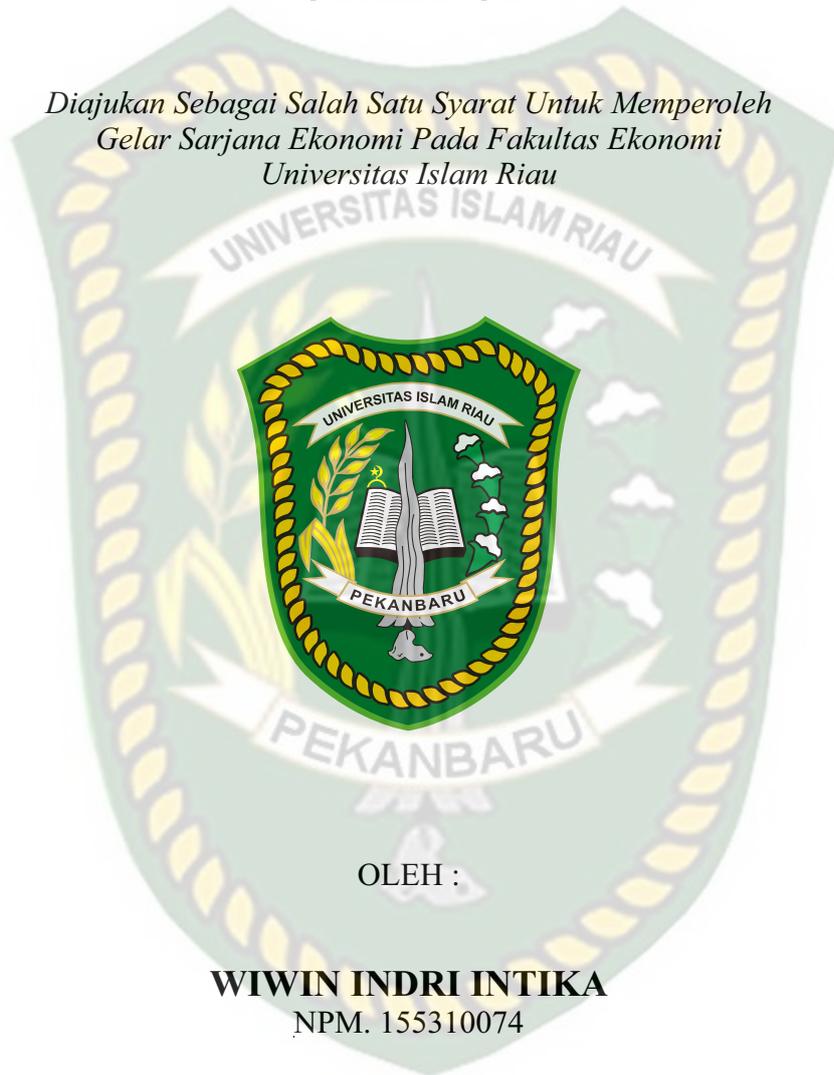


**ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN
PADA PT. TRITUNGGAL PERKASA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau*



OLEH :

WIWIN INDRI INTIKA
NPM. 155310074

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp.(0761) 674681 fax.(0761)674834 PEKANBARU - 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : WIWIN INDRI INTIKA
NPM : 155310074
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : AKUNTANSI-S1
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban Pada PT.Tritunggal
Perkasa Pekanbaru

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING I

Yusrawati, SE., M.Si

Mengetahui :

DEKAN

KETUA PRODI AKUNTANSI S1

Drs. H. Abrar, M.Si., AK., CA

Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., AK., CA

Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban Pada PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru

ABSTRAK

OLEH : WIWIN INDRI INTIKA
155310074

PT.Tritunggal Perkasa Pekanbaru merupakan salah satu badan usaha yang bergerak dibidang konstruksi yang memberikan jasa konstruksi maupun jasa interior dengan alamat Jalan Panglima Undan No.91 KampungBandarKecamatanSenapelan. Pada tanggal 21 November 2016 PT.Tritunggal PerkasaPekanbaru menandatangani perjanjian dengan Dinas Pemukiman dan Prasarana Umum Kabupaten IndragiriHilir dengan nomor kontrak: 0063/AIRM2/PPK-DPPU/XI/2016 untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan infrastruktur air minum wilayah III di Kabupaten IndragiriHilir dengan lokasi Desa TeklukMerbau Kecamatan Gaung, DesaJayaBakti Kecamatan Enok dan Desa TelukKiambang Kecamatan Tempuling dengan nilai kontrak Rp.1.360.238.000 termasuk PPN10%. Waktu pelaksanaan pekerjaan 290 hari (mulai tanggal 21 November 2016 dan berakhir tanggal 15 Desember 2017). Penelitian ini penulis lakukan berdasarkan tujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan pengakuan pendapatan dan beban pada PT.Tritunggal Perkasa Pekanbaru dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Jenis dan sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan pencatatan yang dilakukan perusahaan saat menerima uang muka dengan mendebet kas dan mengkreditkan pendapatan proyek, saat pengajuan permohonan pembayaran termin perusahaan tidak melakukan pencatatan. Saat penerimaan atau pembayaran kas, perusahaan baru melakukan pencatatan. Perusahaan tidak melakukan *cutoff* berkaitan dengan pendapatan yang diterima pada periode tersebut yaitu pendapatan dari tanggal 15 Desember 2010 sampai tanggal 31 Desember 2016. Perusahaan tidak melakukan pengklasifikasian atas biaya yang ada dengan cara mendebetkan langsung item harga pokok pendapatan proyek.

Katakunci : pengakuan pendapatan dan beban

Analysis of Revenue and Expense Recognition at PT.Tritunggal Perkasa Pekanbaru

ABSTRACT

BY : WIWIN INDRI INTIKA
NPM.155310074

PT.Tritunggal Perkasa Pekanbaru is one of the business entities engaged in construction that provides construction services and interior services with the address of Jalan Panglima Undan No.91 Kampung Bandar Kecen Senapelan. On November 21, 2016 PT.Tritunggal Perkasa Pekanbaru signed an agreement with the Indragiri Hilir Regency Resettlement and Public Infrastructure Service with the contract number: 0063 / AIRM2 / PPK-DPPU / XI / 2016 for the implementation of work to improve drinking water infrastructure in region III in Indragiri Hilir Regency with the location of Desa Tekluk Merbau Gaung Subdistrict, Jaya Bakti Village, Enok Subdistrict and Teluk Kiambang Village, Tempuling Subdistrict with a contract value of Rp. 1,360,238,000 including PPN10%. Time of work is 290 days (starting November 21, 2016 and ending on December 15, 2017). This research is based on the aim of the writer to find out the appropriateness of the application of revenue and expense recognition at PT. Trinity Perkasa Pekanbaru with General Acceptance Accounting Principles. The types and sources of research data are primary and secondary data. Data collection techniques used were interviews and documentation. Analysis of the data used in this research is descriptive method.

From the results of the study, conclusions can be drawn from the company's record when receiving a down payment by debiting cash and crediting project income, when submitting an application for payment termin the company does not take notes. At the time of receipt or payment of cash, the new company records. The company did not make a cutoff related to the revenue received in that period, namely income from December 15, 2010 to December 31, 2016. The company did not classify the costs incurred by directly debiting the cost of project revenue.

Keywords: recognition of income and expenses

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban Pada PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru**" yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana S1 jurusan program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekeliruan dan kekurangan karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kemajuan penulis pada masa yang akan datang.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan proposal ini, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Drs Abrar, M. Si, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Yusrawati, SE, M.Si, CA selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau juga sekaligus selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
4. Bapak Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
5. Kepada kedua orang tuaku tercinta dan keluarga yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada Bapak Pimpinan, staff dan karyawan PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru yang telah bersedia menyediakan data yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan yang sama-sama menggali ilmu khususnya angkatan 2015 Jurusan Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Mudah mudahan apa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebajikan bagi kita semua dan dibalas oleh Allah SWT. Amin

Pekanbaru, Desember 2019

Penulis,

WIWIN INDRI INTIKA

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--------------------------------------------|------|
| ABSTRAK | i |
| KATAPENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| D. Sistematika Penulisan..... | 9 |
| BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS | |
| A. Telaah Pustaka..... | 10 |
| 1. Pengertian Akuntansi | 10 |
| 2. Pengertian Pendapatan | 11 |
| 3. Klasifikasi Pendapatan | 14 |
| 4. Sumber-sumber Pendapatan..... | 15 |
| 5. Pengakuan Pendapatan..... | 18 |
| 6. Pengakuan Pendapatan Konstruksi | 26 |
| 7. Pengertian Beban..... | 35 |
| 8. Jenis-Jenis Beban | 37 |
| 9. Pengakuan dan Pengukuran Beban | 38 |

| | |
|---------------------------------------------------------|----|
| 10. Prinsip Mempertimbangkan Pendapatan dan Beban | |
| Pendapatan | 40 |
| 11. Masalah Pisah Batas (<i>Cut Off</i>)..... | 40 |
| B. Hipotesis | 41 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Lokasi Penelitian | 42 |
| B. Jenis Dan Sumber Data..... | 42 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 42 |
| D. Teknik Analisis Data | 43 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN | |
| A. Sejarah Umum Perusahaan..... | 44 |
| B. Visi dan Misi | 45 |
| C. Struktur Organisasi | 45 |
| D. Aktivitas Perusahaan | 48 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Pengakuan Pendapatan dan Beban Menurut Perusahaan . | 51 |
| 1. Pencatatan Pendapatan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan | |
| Penerimaan Uang Muka | 51 |
| 2. Pembayaran termin I | 51 |
| 3. Pembayaran termin II | 52 |
| 4. Pembayaran termin III..... | 53 |
| 5. Pembayaran retensi/jaminan pemeliharaan (5%)..... | 54 |
| 6. Pencatatan Beban Yang Dilakukan Oleh Perusahaan | 55 |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----|
| B. | Pengakuan Pendapatan dan Beban Yang Seharusnya | 56 |
| 1. | Penerimaan Uang Muka | 56 |
| 2. | Pembayaran termin I | 56 |
| 3. | Pisah Batas/Cut Off pada tanggal 31 Desember 2016 | 56 |
| 4. | Pembayaran termin II | 59 |
| 5. | Pembayaran termin III | 60 |
| 6. | Pembayaran retensi/jaminan pemeliharaan (5%) | 61 |
| C. | Penandingan Antara Pendapatan dan Beban Yang Seharusnya | 61 |
| 1. | Mencatat Pendapatan Pada Akhir Periode tahun 2016 | 62 |
| 2. | Mencatat Beban Pada Akhir Periode tahun 2016 | 62 |
| 3. | Jurnal penyelesaian kontrak | 63 |
| BAB VI PENUTUP | | |
| A. | Kesimpulan | 64 |
| B. | Saran | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |

DAFTAR TABEL

| Tabel | | Hal |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| II.1 | Taksiran Biaya Kontrak..... | 30 |
| II.2 | Pendapatan dan Laba Kotor yang Diakui Menurut Metode Persentase Penyelesaian..... | 31 |



DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Keuangan PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan jasa konstruksi yang semakin berkembang dan meluas kegiatannya melibatkan banyak pihak yang berkepentingan terhadap hasil laporan keuangannya, baik pihak investor maupun pihak klien yang membutuhkan pertanggung jawaban atas alokasi dana serta biaya yang terkait dengan penyelesaian proyek pembangunan, terutama bagi perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba yang optimal. Pendapatan dan beban adalah bagian terpenting untuk menghasilkan laba dan mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Agar suatu laporan keuangan periodik menunjukkan hasil-hasil operasi yang wajar maka dibutuhkan proses pertemuan antara pendapatan dan beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan laba secara tepat pada periode yang sama sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga laporan keuangan menjadi jelas dan dapat di mengerti secara universal.

Secara umum hal-hal yang menjadi masalah dalam akuntansi pendapatan dan beban adalah masalah pengukuran dan pengakuannya. Perusahaan konstruksi dalam menyelesaikan suatu proyek memiliki proses jangka waktu yang bervariasi, ada yang kurang dari satu tahun dan ada yang lebih dari satu periode akuntansi. Dalam hal ini, perusahaan jasa konstruksi harus memperhatikan pengakuan dan pengukuran pendapatan serta beban pada proyek yang dilakukan. Oleh karena itu, terdapat dua metode pengakuan yang menjadi acuan dalam pengakuannya yaitu metode kontrak selesai (*Completed Contract Method*) adalah metode yang

mengakui pendapatan dan laba kotor diakui hanya pada waktu kontrak selesai dan metode persentasi penyelesaian (*Percentage Completion Method*) adalah metode yang mengakui pendapatan dan beban sesuai dengan tingkat kemajuan penyelesaian kontrak dan tidak menunggu sampai kontrak diselesaikan.

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa kontraktor dalam pengakuan pendapatan dan beban terdapat 2 metode yaitu Metode Persentase Penyelesaian, dalam metode ini pendapatan diakui sesuai dengan persentase kemajuan pelaksanaan kegiatan kontrak dan Metode Kontrak Selesai, dalam metode ini pendapatan diakui jika kontrak telah diselesaikan seluruhnya atau telah terjadi serah terima yang sah. Dalam metode persentase penyelesaian, pengukuran pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan menggunakan metode *Cost to Cost Method* (Metode Biaya ke Biaya) dan Metode Fisik.

Metode *cost to cost* merupakan pengakuan pendapatan dan beban dengan jalan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan selanjutnya dibandingkan dengan seluruh biaya kontrak. Sementara metode fisik merupakan pengakuan pendapatan dan beban dengan berdasarkan pada jam kerja buruh langsung, jam kerja mesin selanjutnya dibandingkan dengan total taksiran jam yang dibutuhkan secara keseluruhan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi pekerjaan konstruksi dan pembangunan jangka panjang ini diatur secara khusus dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.34 tentang Akuntansi Kontrak Kontruksi. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.34 paragraf 3 mendefinisikan “kontrak konstruksi adalah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang

berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan.” Menurut paragraf 22 mengenai “akuntansi kontrak konstruksi diatur syarat pengakuan dan pencatatan pendapatan dan biaya kontrak untuk pekerjaan kontrak konstruksi yaitu jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan.”

Berdasarkan PSAK No. 34 paragraf 30 tahap penyelesaian suatu kontrak dapat ditentukan dalam berbagai cara. Entitas/perusahaan dapat menggunakan metode yang mengukur secara andal pekerjaan yang dilakukan bergantung pada sifat kontrak, metode tersebut antara lain termasuk proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak, survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan penyelesaian suatu bagian fisik dari pekerjaan kontrak. Pembayaran berkala dan uang muka yang diterima dari para pelanggan sering kali tidak mencerminkan tahap penyelesaian. Ketepatan perlakuan akuntansi dalam mengakui pendapatan dan beban sangat berpengaruh terhadap keakuratan yang dihasilkan dalam laporan laba rugi periodik.

Dalam paragraf 39-45 diatur mengenai “pengungkapan dalam laporan keuangan sebagai berikut: jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan pada periode, metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui pada periode, dan metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak.” Pendapatan dinyatakan sebagai periode kegiatan

ekonomi dalam menciptakan dan kegiatan jual beli barang dan jasa yang dihasilkan dan dicatat atau diukur secara handal dan objektif. Sedangkan beban sebagai pengurang terhadap pendapatan harus dilaporkan pada saat yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan dari pengorbanan tersebut.

Suatu kontrak dapat ditentukan dalam berbagai cara (PSAK No. 34 paragraf 30). “Entitas/perusahaan menggunakan metode yang mengukur secara andal pekerjaan yang dilakukan.” Tergantung sifat dan metode kontrak termasuk proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak, survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan penyelesaian suatu bagian fisik dari pekerjaan kontrak. Pembayaran berkala dan uang muka yang diterima dari para pelanggan sering kali tidak mencerminkan tahap penyelesaian.

PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru merupakan salah satu badan usaha yang bergerak di bidang konstruksi yang memberikan jasa konstruksi maupun jasa interior. Perusahaan ini sering dihadapkan pada masalah pengakuan pendapatan dan penentuan beban-beban yang muncul selama pelaksanaan proyek konstruksi yang masa penyelesaiannya lebih dari satu periode akuntansi sehingga sangat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan yang sesuai dengan kinerja perusahaan pada periode tersebut. Pengakuan Pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan masih belum sesuai dengan PSAK No. 34 tentang kontrak konstruksi karena perusahaan mengakui pendapatan dengan menggunakan metode kontrak selesai untuk semua proyeknya termasuk proyek dengan kontrak jangka panjang.

Pekerjaan proyek konstruksi PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru dipeoleh dengan cara mengikuti tender atau lelang. Ketika perusahaan dinyatakan menang

tender maka, antara dilakukan perjanjian kontrak kerja, seperti jangka waktu pelaksanaan, waktu dan cara pembayaran serta hal-hal lainnya kontraktor dengan pemberi kerja. Pengakuan pendapatannya, PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru yaitu pendapatan diakui sesuai dengan kemajuan pekerjaan persentase. Pembayaran atas selesainya pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan berdasarkan berdasarkan tahap tingkat kemajuan pekerjaan. Penyerahan tahap pekerjaan dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah telah dilaksanakan kontraktor dengan pemberi tugas.

Pada tanggal 21 November 2016 PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru menandatangani perjanjian dengan Dinas Pemukiman dan Prasarana Umum Kabupaten Indragiri Hilir dengan nomor kontrak : 0063/AIRM2/PPK-DPPU/XI/2016 untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan infrastruktur air minum wilayah III di Kabupaten Indragiri Hilir dengan lokasi Desa Tekluk Merbau Kecamatan Gaung, Desa Jaya Bakti Kecamatan Enok dan Desa Teluk Kiambang Kecamatan Tempuling dengan nilai kontrak Rp. 1.360.238.000 termasuk PPN 10%. Waktu pelaksanaan pekerjaan 290 hari (mulai tanggal 21 November 2016 dan berakhir tanggal 15 Desember 2017). (Lampiran 13)

Berdasarkan surat perjanjian diketahui bahwa pada saat proyek akan dimulai, perusahaan menerima uang muka seminggu setelah pekerjaan mulai dilaksanakan dan perusahaan mengakui uang muka tersebut sebagai pendapatan. Pencatatan yang dilakukan perusahaan saat menerima uang muka pada tanggal 30 November 2016 sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.360.238.000 x 20% yaitu dengan mendebet kas sebesar Rp. 272.047.600 dan mengkreditkan pendapatan proyek sebesar Rp. 272.047.600. (Lampiran 18).

Pada saat pengajuan permohonan pembayaran termin I sebesar 30 % dari nilai kontrak yakni Rp. 408.071.400 pada tanggal 15 Desember 2016 (Lampiran 14) perusahaan tidak melakukan pencatatan, Pencatatan yang dilakukan ketika penerimaan termin I dengan bobot 25% tanggal 03 Januari 2017, dengan cara mendebet Kas sebesar Rp. 265.246.100, potongan uang muka sebesar Rp. 81.614.280, PPN 10% sebesar Rp. 40.807.140, PPh jasa konstruksi 5% sebesar Rp. 20.403.570 serta mengkreditkan Pendapatan Proyek Rp. 408.071.400. (Lampiran 19).

Perusahaan tidak membuat ayat jurnal penyesuaian berdasarkan kemajuan fisik pekerjaan pada periode tersebut yakni tanggal 31 Desember 2016. Perusahaan tidak melakukan pisah batas pendapatan tersebut yaitu pendapatan tanggal 15 Desember 2010 sampai tanggal 31 Desember 2016.

Demikian juga dengan pencatatan untuk termin II (Lampiran 15) dengan bobot 60% tanggal 5 April 2017, dengan cara mendebet Kas sebesar Rp. 265.246.410, potongan uang muka sebesar Rp. 81.614.280, PPN 10% sebesar Rp. 40.807.140, PPh jasa konstruksi 5% sebesar Rp. 20.403.570 dan mengkreditkan Pendapatan Proyek Rp. 408.071.400. (Lampiran 20).

Untuk pencatatan pembayaran retensi yang diterima tanggal 14 November 2017 (Lampiran 13) dengan cara mendebet Kas sebesar Rp. 44.207.735, potongan uang muka sebesar Rp. 13.602.380, PPN 10% sebesar Rp. 6.801.190, PPh jasa konstruksi 5% sebesar Rp. 3.400.595 dan mengkreditkan Pendapatan Proyek Rp. 68.248.092.

Perusahaan tidak melakukan pengklasifikasian atas biaya yang ada dengan cara mendebetkan langsung item harga pokok pendapatan proyek. Komponen

biaya dalam pelaksanaan proyek terdiri atas biaya material, biaya tenaga kerja dan biaya overhead proyek. Perusahaan juga memasukkan beban penyusutan pada tahun 2016 sebesar Rp. 151.999.400 (Lampiran 8) dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 140.265.000 (Lampiran 2) pada laporan keuangan dengan menjurnal pada debet beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan. Perusahaan menggabungkan peralatan dan mesin yang digunakan langsung dalam peralatan proyek dalam laporan keuangannya. Seharusnya biaya penyusutan peralatan dan mesin dimasukkan sebagai biaya overhead dalam perhitungan harga pokok pendapatan. Penulis tertarik untuk meneliti dan membahas masalah mengenai penerapan pengakuan pendapatan dan beban yang diterapkan oleh PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru dari latar belakang masalah dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban Pada PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang masalah, penulis dapat merumuskan masalah, yaitu : “Apakah pengakuan pendapatan dan beban pada PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima umum? “

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dalam penelitian ini adalah :

Penelitian ini penulis lakukan berdasarkan tujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan pengakuan pendapatan dan beban pada PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

2. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Perusahaan, diharapkan penelitian yang penulis kerjakan dapat memberikan sumbangan pikiran untuk perbaikan dan penyempurnaan sehubungan dengan penerapan pengakuan pendapatan dan beban.
- b. Bagi pihak lain, sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang
- c. Bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai penerapan pengakuan pendapatan dan beban.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis membagi sistematika penulisan berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang memuat literatur terkait dengan topik penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa data

BAB IV : Gambaran Umum Perusahaan

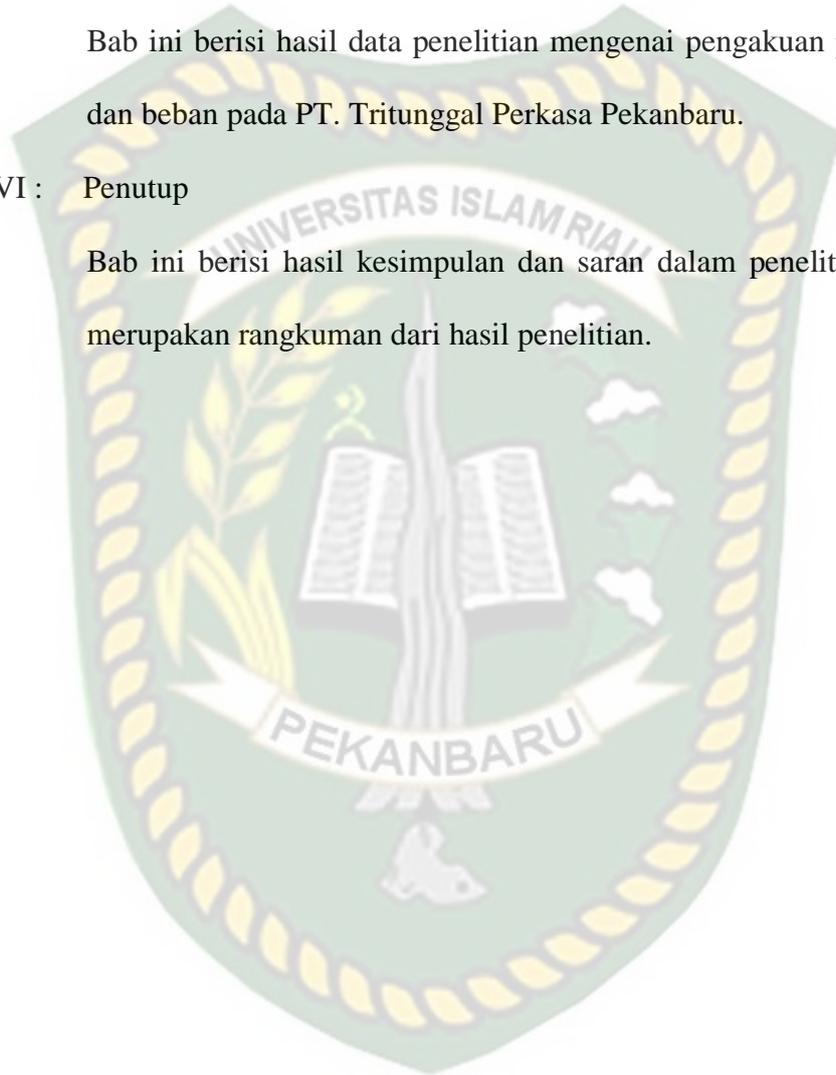
Bab ini berisi sejarah singkat perusahaan berupa gambaran umum, struktur organisasi dan aktivitas perusahaan.

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil data penelitian mengenai pengakuan pendapatan dan beban pada PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisi hasil kesimpulan dan saran dalam penelitian ini dan merupakan rangkuman dari hasil penelitian.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Pengertian Akuntansi

Ilmu akuntansi merupakan seni pencatatan dan penyajian keuangan kegiatan usaha perusahaan yang berperan penting karena menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berikut ini dapat dilihat pengertian akuntansi dari beberapa ahli akuntansi, seperti menurut Warren, Reeve dkk (2014:3), akuntansi adalah sebuah laporan yang didalamnya tersedia informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan digunakan dalam kegiatan ekonomi dan untuk melihat kondisi perusahaan.

Menurut beberapa ahli yaitu Surwadjono (2015:10) menyatakan bahwa:

Akuntansi adalah ilmu yang mempelajari dan menyediakan informasi berupa informasi keuangan dalam suatu kegiatan usaha dan menggunakan pelaporan atau penyampaian yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi yang berkepentingan.”

Dalam arti sempit sebagai proses, fungsi, atau praktik, akuntansi dapat didefinisikan sebagai: Proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar (bahan olah akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan. Menurut Walter (2012:3) pengertian akuntansi adalah suatu sistem informasi, yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi

laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis.”

Menurut *American Accounting Association* yang diterjemahkan oleh Soemarso S.R (2009:3) akuntansi adalah : “Proses mendefinisikan, mengatur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.” Menurut Rudianto (2014:4) akuntansi adalah “Sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihakpihak yang berkepentingan mengenai aktifitas ekonomi dan kondisi perusahaan.” Menurut Belkaoui (2010:50) pengertian akuntansi adalah: “sebagai suatu seni pencatatan pengklasifikasikan dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadiankejadian yang paling tidak sebagai diantaranya, memiliki sifat keuangan dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya.”

Dari pengertian akuntansi yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan kejadian-kejadian ekonomi suatu organisasi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi para pemakainya. Dalam kehidupan sehari-hari baik disadari maupun tidak, masyarakat sudah menggunakan fungsi akuntansi. Hal ini terwujud dalam bentuk pencatatanpencatatan yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dan mengendalikan keuangannya.Jadi besar kecilnya cakupan pengetahuan dan penerapan akuntansi sangat tergantung pada tingkat kebutuhannya dan fungsi akuntansi itu sendiri.

2. Pengertian Pendapatan

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Sebagai suatu organisasi yang berorientasi *profit* maka pendapatan mempunyai peranan yang sangat besar, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan

Banyak pengertian tentang pendapatan yang dinyatakan para ahli tapi sejauh ini konsep mengenai pendapatan belum dirumuskan secara jelas, namun inti dan tujuan dari semua pengertian tentang pendapatan adalah sama. Definisi pendapatan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2009:23.6) : Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Kemudian menurut Kieso, Warfield dan Weygandt (2011:955), pendapatan adalah arus kas masuk aktiva dan/atau penyelesaian kewajiban dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, dan aktivitas pencarian laba lainnya yang merupakan operasi yang utama atau besar yang berkesinambungan selama suatu periode. Martani, dkk (2016:204) menjelaskan pengertian pendapatan adalah sebagai berikut: Pendapatan adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas normal dari suatu entitas dan merujuk kepada istilah yang berbeda-beda seperti penjualan (*sales*), pendapatan jasa (*fees*), bunga (*interest*), dividen (*dividend*), dan royalti (*royalty*).

Menurut Harahap (2011:236) mengemukakan bahwa pendapatan adalah hasil penjualan barang dan jasa yang dibebankan kepada langganan/mereka yang menerima. Sedangkan menurut Jusup (2010:41) yang menyatakan bahwa: Pendapatan meliputi sumber-sumber ekonomi yang diterima perusahaan dari transaksi barang dan jasa kepada pihak lain. Sedangkan pendapatan menurut Soemarso (2012:58) lebih cenderung mendekati prinsip arus keluar dari barang dan jasa sehingga pendapatan diperoleh dari perusahaan sebesar yang ditanggung oleh langganannya, hal ini dapat dilihat dari definisi, Pendapatan merupakan jumlah yang dibebankan kepada langganannya atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan.

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan dari pengertian pendapatan ini dapat dilihat dari sudut pandang masing-masing para ahli dalam merumuskan pengertian pendapatan tersebut.

Adapun secara umum ditemukan dua pendekatan terhadap konsep pendapatan dalam hubungannya dengan pengakuan dan pengukurannya, yaitu:

1. Pendekatan yang memusatkan perhatian pada arus masuk aktiva yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan (*inflow of net assets*)
2. Pendekatan yang memusatkan perhatian pada penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan kepada konsumen lain (*outflow of goods and service*)

Dari kutipan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan pendapatan terbagi 2 yakni penciptaan arus masuk dalam hal ini adalah uang atau kas yang diterima dan penciptaan barang/jasa dan dijual kepada konsumen. Keunggulan dari pendekatan arus masuk yaitu dimana kenaikan aktiva atau

penurunan piutang pada waktu penjualan atau pengalihan aktiva dilakukan dalam unit moneter dan definisi tentang pendapatan dari sudut pandang (konsep) ini perlu ditegaskan mana arus masuk yang dianggap sebagai pendapatan dan mana yang bukan pendapatan. Kenaikan aktiva dan penurunan piutang dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

Hal ini dijelaskan dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2009:23.7) yang menyebutkan bahwa: "Pendapatan hanya terdiri dari arus masuk manfaat yang dinilai dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih atas nama pihak, seperti PPN bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas dan karena itu harus dikeluarkan dari pendapatan." Kedua konsep diatas baik pendapatan yang dipandang dari sudut arus masuk maupun dari sudut arus keluar memiliki keunggulan tersendiri dan memiliki kesamaan mengenai pendapatan yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai balas jasa dari produk barang dan kepada pelanggan jasa yang dihasilkan perusahaan, yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu.

3. Klasifikasi Pendapatan

Pendapatan yang diperoleh perusahaan harus dilakukan pengklasifikasian agar pendapatan tersebut dapat diketahui sumbernya. Dengan mengetahui sumber pendapatan, maka perusahaan dapat mengadakan evaluasi dalam menargetkan yang akan diperoleh. Pendapatan dapat dipandang dari beberapa sudut pandang yaitu:

- a. Sudut pandang perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk rupiah. Maksud dari sudut pandang perusahaan dan dinyatakan dalam bentuk rupiah adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan pada akhirnya ditunjukkan dengan aliran dana yang masuk ke perusahaan dari konsumen sebagai penukar produk perusahaan baik barang ataupun jasa.
- b. Dari sudut pandang perusahaan. Pendapatan dipandang sebagai pendapatan netto yaitu kelebihan aliran sumber ekonomi yang masuk diatas aliran potensi jasa yang keluar dari kesatuan usaha dalam bentuk biaya-biaya yang dapat dibebankan.

Menurut Soemarso (2012:47) juga menjelaskan: “Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan juga didefinisikan sebagai kenaikan bruto dalam modal (biasanya melalui diterimanya suatu aktiva dari langganan) yang berasal dari barang dan jasa yang dijual.” Transaksi yang bukan berupa produk pendapatan adalah:

- a. Laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa produk dari perusahaan.
- b. Revaluasi aktiva. Transaksi modal atau pendapatan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang saham dan pemegang obligasi

4. Sumber-sumber Pendapatan

Sebelumnya telah dibahas definisi-definisi tentang pendapatan sebagai produk perusahaan dan perbedaan konsep pendapatan, namun masih terdapat beberapa perbedaan tentang pendapatan bila dihubungkan dengan sifat dan sumber dari pendapatan. Titik tolak dari perbedaan itu adalah perlu atau tidaknya pemisahan antara kegiatan yang menghasilkan pendapatan dengan kegiatan yang

menghasilkan untung atau rugi. Menurut Harahap (2012:115) “dalam menentukan sumber-sumber pendapatan terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan ini umumnya bertitik tolak pada perlu tidaknya pemisahan (*cut off*) antara kegiatan yang menghasilkan pendapatan, keuntungan dan kerugian.” Kegiatan yang menghasilkan pendapatan adalah kegiatan penjualan atau penyerahan barang atau jasa perusahaan kepada pelanggan.

Sedangkan yang dimaksud dengan keuntungan adalah naiknya nilai equity dari transaksi yang bersifat insidental dan bukannya dari kegiatan utama perusahaan dan dari transaksi lainnya yang mempengaruhi entity selama satu periode tertentu. Kemudian Greuning, et al (2013:290) juga menjelaskan sumber pendapatan lain, yaitu:

- a. Pendapatan sewa
- b. Investasi dengan metode ekuitas
- c. Kontrak asuransi, perubahan dalam nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan.
- d. Pengakuan awal dan perubahan dalam nilai wajar atas aset biologis

Dalam menentukan sumber pendapatan, ada beberapa perbedaan antara kegiatan untuk menghasilkan pendapatan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:23.1) pendapatan akan timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomis berikut:

- a. Penjualan barang
- b. Penjualan jasa; dan
- c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen.

Harnanto (2010:2) mengklasifikasikan pendapatan berdasarkan sumbernya sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang berasal dari usaha pokok
 - 1). Hasil Penjualan (perusahaan dagang dan manufaktur)
 - 2). Pendapatan jasa angkut (perusahaan transportasi)
- b. Pendapatan diluar usaha.
Pendapatan diluar usaha meliputi semua aktiva yang dapat atau berkurangnya hutang-hutang perusahaan selain yang bersumber dari:
 - 1). Transaksi penjualan barang dagangan, barang jadi dan penyerahan jasa yang dihasilkan dan kegiatan usaha pokok perusahaan kepada pembeli atau pemakai jasa.
 - 2). Pembeli, setoran modal oleh pemilik dan transaksi modal lainnya.
 Pendapatan yang diperoleh perusahaan terdiri dari:
 - a. Nilai pendapatan yang semula disetujui dalam kontrak.
 - b. Penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran insentif.
 - c. Sepanjang hal itu memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dapat diukur secara andal.

Menurut Suwarjono (2012:71), ada 5 (lima) sumber bertambahnya aktiva suatu perusahaan yang berasal dari:

- a. Transaksi modal (pembelanjaan) yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang obligasi (kreditur) dan pemegang saham.
- b. Laba penjualan yang bukan berupa barang dagangan seperti aktiva tetap, surat-surat berharga atau penjualan anak atau cabang perusahaan.
- c. Hadiah atau sumbangan
- d. Penyerahan produk perusahaan yaitu aliran hasil penjualan produksi
- e. Revaluasi aktiva

Pada laporan laba rugi dapat diketahui bahwa sumber pendapatan perusahaan terdiri dari dua kelompok yaitu:

- a. Pendapatan operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan.
- b. Pendapatan non operasional. Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan diluar operasi utama

yang bersifat insidental atau irreguler seperti penerimaan bunga, dividen, dan royalti.

Dalam penentuan sumber pendapatan terdapat beberapa perbedaan dimana pada umumnya kegiatan yang menghasilkan pendapatan, keuntungan atau kerugian lainnya dengan perubahan dalam aktiva netto perusahaan selain transaksi modal yang dilaporkan dalam suatu periode harus dianggap sebagai pendapatan. Dari pembahasan dan penjelasan pendapatan di atas bersumber dari:

- a. Pendapatan operasi, yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan normal perusahaan yang sering terjadi dan merupakan penapatan utama perusahaan.
- b. Pendapatan non-operasi, yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan perusahaan yang jarang terjadi dalam perusahaan yang hanya merupakan pendapatan tambahan.

5. Pengakuan Pendapatan

Masalah waktu yang tepat untuk mengakui pendapatan telah menjadi perhatian besar selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, secara konseptual pendapatan hanya diakui jika memenuhi kualitas keterukuran dan keterandalan. Menurut Pura (2013:27) dasar pengakuan pendapatan secara umum ada dua cara yaitu:

- a. Dasar Kas (*Cash Basis*).
Pengakuan pendapatan dalam basis kas adalah pada saat perusahaan menerima pembayaran secara tunai. Kas yang diterima dari pendapatan untuk lebih dari satu periode akuntansi akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan pada periode akuntansi saat pendapatan itu diterima.
- b. Dasar Akrual (*Accrual Basis*).
Pada dasar akrual, pendapatan dilaporkan dalam laporan rugi pada periode ketika pendapatan tersebut dihasilkan tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Sedangkan menurut Amilin (2015:2.2) ada dua metode untuk pencatatan transaksi dalam akuntansi, yaitu basis kas dan basis akrual. Berikut ini penjelasannya :

a. Basis Kas (*Cash Basis*)

Pengakuan pendapatan pada cash basis adalah pada saat perusahaan menerima pembayaran secara kas. Dalam konsep cash basis menjadi hal yang kurang penting mengenai hak untuk menagih.

b. Basis Akrual

Pada dasar akrual ini, pendapatan diakui saat diperoleh dan saat direalisasi dan terjadi ketika perusahaan menyerahkan produk atau jasanya. Pendapatan dapat direalisasi saat memperoleh aktiva yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas serta dapat diakui saat barang atau jasa masih dalam produksi, selesai diproduksi atau tergantung keadaan suatu perusahaan.

Jadi dalam transaksi penjualan barang dan jasa yang dilakukan walaupun kas belum diterima, maka transaksi tersebut sudah dicatat dan diakui sebagai pendapatan perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:23.1), “Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomik masa depan akan mengalir ke entitas dan manfaat ini dapat diukur secara andal”.

Pengakuan pendapatan menurut Martani dkk (2016:208-209), yaitu:

“Pendapatan diakui ketika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke dalam perusahaan dan nilai manfaat tersebut dapat diukur dengan andal. Walaupun pada umumnya pendapatan diakui pada saat penyerahan barang atau jasa, namun mungkin saja pendapatan diakui pada waktu lain, yaitu sebelum penyerahan barang atau jasa maupun setelah penyerahan. Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan, umum terjadi pada kontrak konstruksi gedung. Pendapatan sudah dapat diakui sebelum penyerahan gedung dengan beberapa persyaratan atau kondisi yang harus terpenuhi. Metode akuntansi untuk mengakui pendapatan menggunakan metode persentase penyelesaian pekerjaan.”

Pengakuan pendapatan untuk kontrak jangka panjang menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:34.5) adalah:

“Jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak

konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan. Taksiran rugi pada kontrak konstruksi tersebut segera diakui sebagai beban.”

Dalam hal kontrak harga tetap, hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal jika semua kondisi berikut ini dapat terpenuhi:

- a. Total pendapatan kontrak dapat diukur secara andal
- b. Kemungkinan besar manfaat ekonomik yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan mengalir ke entitas
- c. Baik biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak maupun tahap penyelesaian kontrak pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal
- d. Biaya kontrak yang dapat diatribusi pada kontrak dapat diidentifikasi dengan jelas dan diukur secara andal sehingga biaya kontrak aktual dapat dibandingkan dengan estimasi sebelumnya.

Ikatan Akuntan Indonesia (2015:34.5) juga menjelaskan bahwa “Pada kontrak biaya plus, hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal jika kondisi terpenuhi yaitu kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan mengalir ke entitas.

Selanjutnya Martani, dkk (2016:222) juga menjelaskan bahwa:

“Pengakuan pendapatan kontrak dapat dilakukan dengan memperhatikan apakah hasil dari kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal. Berdasarkan hal tersebut, dalam metode persentase penyelesaian (*percentage of completion method*), perusahaan mengakui pendapatan, beban, dan laba setiap periodenya berdasarkan tahap penyelesaian kontrak, yaitu berdasarkan persentase penyelesaian.”

Dengan demikian pendapatan, beban, dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Untuk

menghitung berapa pendapatan dan laba yang diakui setiap periode, maka perusahaan dapat mengurangkannya dengan total pendapatan atau laba yang sudah diakui sampai periode sebelumnya.

Pengakuan pendapatan adalah mencatat pendapatan pada buku catatan dan melaporkan pendapatan dalam laporan keuangan. Pendapatan suatu perusahaan dapat terjadi selama proses kerja siklus operasional perusahaan saat penjualan dan saat penagihan. Menurut Harahap (2012:229), pendapatan diakui ketika: Suatu pendapatan diakui sebagai suatu penghasilan pada periode kapan kegiatan utama yang perlu untuk menciptakan dan menjual barang telah selesai.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 15, pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca dan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.

Pengakuan mengacu pada waktu pencatatan transaksi dalam pembukuan. Dua kriteria FASB untuk pengakuan pendapatan dan keuntungan dinyatakan dalam *Concept Statement* No.5 dan FASB yang dikutip oleh Stice dan Skousen (2010:567), pendapatan dan keuntungan pada umumnya diakui ketika:

- a. Pendapatan atau keuntungan tersebut sudah direalisasi atau dapat direalisasi.
- b. Pendapatan atau keuntungan tersebut diperoleh dari penyelesaian secara substansial atas aktivitas-aktivitas yang terkait dengan proses menghasilkan.

Adapun pendapatan bisa diakui setelah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Ikatan Akuntan Indonesia (2009:23.12) menetapkan kriteria tentang pengakuan pendapatan sebagai berikut:

- a. Penjualan Barang
 - 1). Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli.
 - 2). Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektivitas barang yang dijual.
 - 3). Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal.
 - 4). Besar kemungkinan manfaat ekonomi dihubungkan dengan transaksi yang akan mengatur kepada perusahaan tersebut.
 - 5). Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.
- b. Penjualan Jasa
 - 1). Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.
 - 2). Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan.
 - 3). Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal.
 - 4). Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.
- c. Bunga, Royalti dan Dividen
 - 1). Bunga harus diakui atas dasar porfesi waktu yang diperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut.
 - 2). Royalti harus diakui atas dasar sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan.
 - 3). Dalam metode biaya (*cost method*), dividen tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan

Menurut Warren (2010:124) dasar pengakuan pendapatan atau *revenue* secara umum ada dua cara yaitu:

- a. Dasar Kas (*Cash Basis*). Pada dasar kas, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode dimana kas diterima atau dibayar. Misalnya, penghasilan dicatat ketika kas ditirima dari klien, dan upah dicatat ketika kas dibayarkan kepada karyawan. Laba (rugi) bersih merupakan selisih antara penerimaan kas (pendapatan) dan pengeluaran kas (beban).
- b. Dasar Akrual (*Accrual Basis*). Pada dasar akrual, pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan (*earned*). Misalnya, pendapatan dilaporkan pada saat jasa diberikan kepada pelanggan tanpa melihat apakah kas telah diterima atau belum dari pelanggan selama periode ini.

Prinsip pengakuan pendapatan menetapkan bahwa pendapatan diakui pada saat:

- a. Direalisasikan atau dapat direalisasikan Pendapatan dapat direalisasikan jika barang atau jasa yang dipertukarkan untuk harga atau klaim atas kas (piutang) pendapatan dapat direalisasikan bila aktiva yang diterima segera dapat dikonversikan pada jumlah kas tau klaim atas kas yang diketahui.
- b. Dihasilkan Pendapatan dihasilkan bila kesatuan itu sebagian besar telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan agar berhak atas manfaat yang diberikan dari pendapatan. Agar permasalahan ini dapat diatasi maka hal ini dapat ditempuh dengan cara menentukan persentase penyelesaian secara fisik ataupun berdasarkan pengorbanan atau pengeluaran yang telah dilakukan untuk menyelesaikan produk atau proyek yang bersangkutan.

Soemarso (2012:47) memberikan pendapat bahwa:

“Pendapatan (*revenue*) adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan dapat juga didefinisikan sebagai kenaikan bruto dalam modal (biasanya melalui diterimanya suatu aktiva dari langganan) yang berasal dari barang yang dijual. Pendapatan seharusnya diidentifikasi dengan periode dimana kegiatan ekonomi yang utama untuk menciptakan dan membagikan barang dan jasa dengan catatan bahwa pengukuran yang objektif dapat dilakukan.”

Selanjutnya menurut Fischer, Taylor dan Leer (2010:14) kriteria pengakuan pendapatan sebagai berikut:

- a. Proses menghasilkan barang dan jasa telah selesai
- b. Pertukaran telah terjadi
- c. Transaksi yang pendapatan memiliki tingkat kepermanenan tinggi.

Berdasarkan kriteria yang disebutkan di atas pendapatan baru diakui apabila telah terjadi pertukaran hak kepemilikan barang dan jasa yang telah selesai

diproses atau mendekati penyelesaian dari pihak penjual kepada pembeli yang bersifat tetap. Dua prinsip di atas Ikatan Akuntan Indonesia (2009:23.12) dengan tegas menyatakan bahwa:

“Untuk memenuhi tujuan dari penyajian laporan keuangan maka prinsip yang harus digunakan adalah dasar akrual, seperti yang diungkapkan sebagai berikut: Untuk mencapai tujuan laporan keuangan disusun atas dasar akrual, dengan dasar ini pengaruh transaksi dan peristiwa lain dialami pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang bersangkutan.”

Menurut PSAK 34 (2010:34.1) :

“Kontrak Konstruksi adalah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan. Pengertian di atas menyebutkan bahwa kontrak konstruksi merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan untuk melaksanakan suatu proyek yang sebelumnya telah tercapai suatu kata sepakat antara perusahaan pemberi jasa dengan pengguna jasa, dimana proyek yang akan dilaksanakan dapat berupa pembuatan jalan raya, pendirian suatu aset, atau dalam bentuk lainnya.”

Sedangkan menurut Dyckman, at. al. (2010:239) kategori waktu yang luas dari pengakuan pendapatan dapat diidentifikasi menjadi tiga yaitu:

- a. Pendapatan diakui pada saat pengiriman produk atau jasa (titik penjualan)
- b. Pendapatan diakui setelah pengiriman produk dan jasa
- c. Pendapatan diakui sebelum pengiriman produk dan jasa

Dengan demikian pendapatan diakui bilamana proses pelaksanaan pemberian jasa setelah selesai dikerjakan atau hampir selesai sehingga dapat dipastikan ada peningkatan manfaat ekonomi secara signifikan bagi perolehan pendapatan perusahaan. Pengakuan pendapatan juga diberikan manakala sudah

terjadi pertukaran jasa, atau peristiwa ekonomi sudah dapat dipastikan akan meningkatkan ekuitas ekonomi perusahaan.

Lebih lanjut Belkaoui (2010:281) menjelaskan mengenai pendapatan selama proses produksi adalah:

- a. Pendapatan sewa, bunga, komisi diakui ketika diperoleh, dengan adanya perjanjian atau kontrak sebelumnya yang menspesifikasikan peningkatan perlahan-lahan dalam klaim terhadap langganan.
- b. Seorang individu atau sekelompok orang yang memberikan jasa profesional atau jasa serupa dapat menggunakan basis akrual dengan lebih baik untuk pengakuan pendapatan, dengan adanya fakta bahwa hakikat dari klaim terhadap pelanggan adalah suatu fungsi dari proporsi jasa yang diberikan.
- c. Pendapatan atas kontrak jangka panjang diakui berdasarkan kemajuan konstruksi atau penyelesaian.
 - 1). Persentase estimasi teknik dari pekerjaan yang dilakukan sampai tanggal tersebut dibandingkan dengan total pekerjaan yang akan diselesaikan dalam hal kontrak
 - 2). Total biaya yang terjadi sampai tanggal tersebut dibandingkan dengan total biaya yang diestimasi untuk total proyek didalam kontrak tersebut.
- d. Pendapatan atas kontrak biaya plus pembiayaan tetap (cost plus fixedfee contract) lebih baik diakui menggunakan basis aktual.
- e. Perubahan aktiva akibat pertumbuhan menimbulkan pendapatan (misalnya ketika minuman atau anggur semakin bertambah umurnya, pohon akan semakin bertumbuh, atau hewan peliharaan akan semakin besar).

Meskipun suatu transaksi harus terjadi sebelum pendapatan diakui dalam contoh-contoh ini, pertumbuhan pendapatan didasarkan pada penilaian persediaan komparatif. Menurut Harnanto (2011:390), transaksi penjualan kepada pihak ekstern menghasilkan tiga macam bukti yang mendukung pengakuan pendapatan:

- a. Tidak ada kewajiban yang melekat pada pihak penjual
- b. Nilai relatif produk atau barang yang dijual ditentukan oleh transaksi yang terjadi antara dua pihak yang independen (keterukuran)
- c. Pihak pembeli yang dianggap berkemampuan untuk membayar harga yang telah disepakati dalam transaksi, telah membayar atau berjanji untuk membayar (kolektibilitas).

Dasar akrual untuk pengakuan pendapatan mengatakan pendapatan hanya dilaporkan selama produksi, pada akhir produksi, pada penjualan barang dan jasa atau pada penagihan penjualan. Secara teoritis pengakuan pendapatan dibagi ke empat siklus yaitu:

- a. Pengakuan pendapatan diakui selama proses produksi
- b. Pengakuan pendapatan diakui pada saat produksi selesai
- c. Pengakuan pendapatan diakui pada saat penjualan
- d. Pengakuan pendapatan diakui pada saat penerimaan kas

6. Pengakuan Pendapatan Konstruksi

Dalam PSAK No. 34 (2010:34.8), tentang pengakuan pendapatan dan biaya kontrak yaitu jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan. Taksiran rugi pada kontrak konstruksi tersebut diakui sebagai beban kontrak.

Ikatan Akuntansi Indonesia (2010:34.9) dalam PSAK No. 34, Pengakuan pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian.

Menurut metode ini, pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, beban dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai luas aktivitas kontrak dan kinerja selama suatu periode.

Perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, sumber utama perolehan pendapatan diperoleh dari penyelesaian kontrak konstruksi.

Ikatan Akuntan Indonesia (2010:34.4) menyebutkan bahwa pendapatan kontrak terdiri dari :

- a. Nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak
- b. Penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran intensif :
 - 1). Sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan
 - 2). Dapat diukur secara andal Pendapatan kontrak diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima.

Pengukuran pendapatan kontrak dipengaruhi oleh beragam ketidakpastian yang bergantung pada hasil dari peristiwa di masa depan. Estimasi sering kali perlu untuk direvisi sesuai dengan realisasi dan hilangnya ketidakpastian. Oleh karena itu, jumlah pendapatan kontrak dapat meningkat atau menurun dari suatu periode berikutnya. Penyimpangan yang disebut diatas adalah suatu instruksi yang diberikan oleh pemberi kerja mengenai perubahan dalam lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam kontrak. Suatu penyimpangan dapat menimbulkan peningkatan atau penurunan dalam pendapatan kontrak. Contohnya, perubahan dalam spesifikasi atau rancangan spesifikasi atau rancangan asset atau perubahan lamanya kontrak.

Dalam profesi akuntan ada dua metode yang dilakukan dalam pengakuan pendapatan untuk perusahaan konstruksi (Harnanto 2011:115) yaitu:

- a. Metode Persentase Penyelesaian (*Percentage of Completion Method*)
 Dalam Hal ini diakui untuk masa yang bersangkutan seharusnya ditetapkan sebagai persentase dari taksiran hasil seluruhnya berdasarkan:
 - 1). Perbandingan antara biaya yang sudah menjdai beban sampai akhir masa penerapan hasil dimaksud dan taksiran biaya seluruhnya untuk menyelesaikan kontraknya dengan menggunakan data yang paling baru.
 - 2). Pengukuran secara lain atas kemajuan pekerjaan dalam rangka penyelesaian keseluruhan dengan memperhatikan pekerjaan yang telah

dilakukan. Pengakuan pendapatan dilakukan sesuai dengan persentase kontrak yang telah selesai dikerjakan. Sebelum diakui pendapatan terlebih dahulu dilakukan pengukuran atas tingkat kemajuan atas prestasi pekerjaan yang dilaksanakan.

Kelebihan dari Metode Persentase Penyelesaian adalah:

- (a). Pendapatan dapat diakui secara periodik sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan tanpa harus menunggu selesainya pekerjaan atas kontrak secara keseluruhan yang umumnya jangka waktunya tidak beraturan.
- (b). Untuk bagian kontrak yang belum selesai pekerjaannya, dapat melakukan penafsiran biaya-biaya yang masih diperlukan penafsirannya.

Kelemahan Metode Persentase Penyelesaian :

- (a). Adanya tanggapan bahwa pendapatan itu timbul karena biaya yang telah dikeluarkan untuk suatu kontrak
- (b). Bagian terakhir pekerjaan akan memakan biaya penyelesaian yang lebih besar dari taksiran semula.

b. Metode Kontrak Selesai (*Completed Contract Method*)

Metode ini mengakui pendapatan pada saat kontrak selesai dikerjakan. Biaya-biaya yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan diakumulasikan kedalam rekening “bangunan dan pelaksanaan”. Sedangkan uang muka yang diterima dari pesanan dikreditkan ke rekening “uang muka pesanan” Pendapatan baru diakui pada akhir periode pelaksanaan atau pada saat selesainya pekerjaan barulah diakui sebagai pendapatan. Dengan demikian laporan pada akhir periode kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kelebihan Metode Kontrak Selesai adalah: Metode ini mengakui bahwa pendapatan itu berdasarkan pada pelaksanaan kontrak selesai dikerjakan dan buka pada taksiran pekerjaan yang belum dilakukan. Kelemahan Metode Kontrak Selesai adalah: Terletak pada proyek yang dilaksanakan memakan waktu lebih dari satu periode. Akibatnya kejanggalan akan timbul pada periode dimana pekerjaan belum selesai dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan sementara pendapatan tidak diakui.

Menurut Rangkuti (2012:52), ada 2 metode dalam pengakuan pendapatan

jasa konstruksi, yaitu :

- a. Metode Kontrak Selesai. Metode kontrak selesai biasanya digunakan perusahaan yang mempunyai kontrak jangka pendek atau proyek yang memiliki resiko tidak dapat diestimasi secara andal. Pada metode ini, laba dilaporkan pada periode sewaktu proyek selesai. Metode pengakuan pendapatan dengan kontrak selesai dapat digunakan hanya pada saat tertentu, yaitu :
 - 1). Jika suatu entitas terutama mempunyai kontrak jangka pendek
 - 2). Jika syarat-syarat untuk menggunakan metode persentase penyelesaian tidak dapat dipenuhi.

3). Jika terdapat bahaya yang melekat dalam kontrak itu di luar risiko bisnis yang normal dan berulang

Berdasarkan pendapat di atas pengakuan pendapatan dengan kontrak selesai baru bisa dilaksanakan jika pengakuan pendapatan dengan persentase penyelesaian tidak dapat dilakukan. Dalam metode kontrak selesai biaya-biaya dari kontrak yang dikerjakan diakumulasikan, dan tidak ada pembebanan yang dilakukan atas rekening pendapatan, biaya dan laba kotor sampai dengan kontrak selesai dikerjakan.

b. Metode Persentase Penyelesaian.

Metode pengakuan pendapatan persentase penyelesaian adalah metode pengakuan yang biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki kontrak jangka panjang, dimana jangka waktunya lebih dari satu periode akuntansi. Metode ini mencerminkan prestasi kerja masa berjalan atas penyelesaian kontrak lebih dari satu periode akuntansi. Metode persentase penyelesaian dalam pengakuan pendapatan kontrak akan memerlukan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- 1). Total pendapatan kontrak harus dapat diukur secara andal
- 2). Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan tertagih dan mengalir ke perusahaan.
- 3). Baik biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak maupun tahap penyelesaian kontrak pada tanggal neraca dapat diukur secara andal
- 4). Biaya kontrak yang dapat diatribusikan ke kontrak dapat diidentifikasi secara jelas sehingga biaya kontrak actual dapat dibandingkan dengan estimasi sebelumnya.

Hardhard Construction Company memiliki kontrak yang dimulai bulan Juli 1992, untuk membangun jembatan senilai \$ 4.500.000 dan diharapkan selesai pada bulan Oktober 2004, dengan taksiran biaya sebesar \$ 4.000.00 data mengenai periode pembangunan (Tabel II.I).

Table II.I : Taksiran Biaya Kontrak

| | 2001 | 2002 | 2003 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Biaya-biaya sampai dengan sekarang | \$ 1.000.000 | \$ 2.916.000 | \$ 4.050.000 |
| Taksiran biaya-biaya penyelesaian | \$ 3.000.000 | \$ 1.134.000 | 0 |
| Taksiran jumlah seluruh biaya | \$ 4.000.000 | \$ 4.050.000 | \$ 4.050.000 |
| Penagihan kemajuan selama setahun | \$ 900.000 | \$ 2.400.000 | \$ 1.200.000 |
| Kas yang diterima setahun | \$ 750.000 | \$ 1.750.000 | \$ 2.000.000 |

Sumber: Donald E. Kieso, Jerry J, Weygandt, Terry D. Warfield Ph. D, 2010, intermediate Accounting. Edisi kesepuluh, John Willey and Sons, New York, Alih bahasa Oleh Gina, Ichsan Setigo Budi, Erlangga, Jakarta, Hal.11

Berdasarkan data table II.I diatas, yang digunakan untuk menentukan kemajuan penyelesaian adalah metode biaya ke biaya, seperti berikut: Pada tahun pertama aktual yang dikeluarkan sebesar \$ 1.000.000 dan taksiran total biaya sebesar \$ 4.000.000 maka persentase penyelesaian untuk tahun pertama adalah sebagai berikut:

$$\frac{\$ 1.000.000}{\$ 4.000.000} \times 100 \% = 25 \%$$

Pada tahun kedua biaya actual yang dikeluarkan sebesar \$ 2.916.000 dan taksiran total biaya sebesar \$ 4.050.000 maka persentase penyelesaian untuk tahun kedua adalah sebagai berikut:

$$\frac{\$ 2.916.000}{\$ 4.050.000} \times 100 \% = 72 \%$$

Pada tahun ketiga biaya actual yang dikeluarkan sebesar \$ 4.050.000 dan taksiran biaya sebesar \$ 4.050.000 maka persentase penyelesaian untuk tahun ketiga adalah sebagai berikut:

$$\frac{\$ 4.050.000}{\$ 4.050.000} \times 100 \% = 100 \%$$

Setelah diketahui pengukuran atas tingkat persentase penyelesaian yang telah dilaksanakan, maka persentase tersebut dikalikan dengan nilai kontrak atau pekerjaan, maka akan diketahui berapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan.

Table II.2 Pendapatan dan Laba Kotor yang Diakui Menurut Metode Persentase Penyelesaian

| | | |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Tahun 2001 | | |
| Pendapatan yang diakui \$4.500.000 x 25% | \$ 1.125.000 | |
| Dikurangi biaya actual | \$ 1.000.000 | |
| Laba kotor | | \$ 125.000 |
| Tahun 2002 | | |
| Pendapatan yang diakui \$4.500.000 x 72% | \$ 3.240.000 | |
| Dikurangi pendapatan tahun 2001 | \$ 1.125.000 | |
| Pendapatan tahun 2002 | | \$ 2.115.000 |
| Dikurangi biaya actual (\$2.916.000-\$1.000.000) | | \$ 1.916.000 |
| Laba kotor | | \$ 199.000 |
| Tahun 2003 | | |
| Pendapatan yang diakui \$ 4.500.000 x 100% | \$ 4.500.000 | |
| Dikurangi pendapatan tahun 2001 dan 2002 | \$ 3.240.000 | |
| Pendapatan tahun 2003 | | \$ 1.260.000 |
| Dikurangi biaya actual (\$4.050.000- \$ 2.916.000) | | \$ 1.134.000 |
| Laba kotor | | \$ 126.000 |

Sumber: Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield Ph. D, 2002, *intermediate Accounting*. Edisi kesepuluh, John Willey and Sons, New York, Alih Bahasa oleh Gania, Ichsan Setigo Budi, Erlangga, Jakarta, Hal. 12.

Dalam menyatakan jumlah pendapatan dan laba yang diperoleh perusahaan secara wajar diperlukan suatu dasar pengukuran yang tepat. Tetapi akan timbul permasalahan dalam menentukan dasar apa yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan tersebut. Menurut Smith dan Skousen (2012:313) pengukuran pendapatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Pengukuran Masukan (*Input Measures*) Pada cara ini pengukuran pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:
 - 1). Metode Biaya ke Biaya (*Cost to Cost Method*)
Suatu metode yang membandingkan biaya yang telah dikeluarkan dengan seluruh biaya kontrak yang diperkirakan dengan memperhitungkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk bagian kontrak yang belum selesai dengan menggunakan data tertentu.
 - 2). Metode yang Dicurahkan (*Effort Expended Method*)
Pengakuan kemajuan pekerjaan didasarkan pada jam kerja buruh langsung, jam kerja mesin dibandingkan dengan total taksiran jam yang dibutuhkan secara keseluruhan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Kelebihan dari metode ini adalah terletak pada penggambaran status dari pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan dan pengakuan berkala atas pendapatan dengan segera pada suatu periode.

b. Pengukuran Atas Keluaran (*Output Measures*)

Pada metode ini menggunakan jasa insinyur atau arsitek dalam mengukur hasil yang telah dicapai secara fisik yang akan dibandingkan dengan total pekerjaan yang harus dilaksanakan secara keseluruhan. Kelebihan dari metode ini adalah dalam hal penafsiran persentase tingkat kemajuan atau prestasi yang telah dicapai secara fisik lebih mendekati kebenaran, sedangkan kekurangannya tidak ada gambaran biaya yang timbul dari keadaan yang diluar dugaan.

Hendriksen (2009:167) menyatakan: Nilai tukar produk atau jasa dinilai dengan jumlah uang yang ekuivalen merupakan dasar yang tepat dalam pengakuan pendapatan bila harga tersebut sudah disetujui kedua belah pihak dalam transaksi independen. Jumlah uang yang ekuivalen ini dapat juga diterapkan dalam pengukuran pendapatan yang diperoleh dari transaksi non-kas.

Chariri (2013:19) berpendapat bahwa: Pendapatan diukur dalam satuan produk atau jasa yang diperlukan dalam suatu transaksi yang bebas "*Arms-length transaction*". Nilai tersebut menunjukkan ekuivalen kas atau nilai diskonto tunai dari uang yang diterima dari transaksi penjualan.

Sehubungan dengan pengukuran pendapatan yang berasal dari kontrak jangka panjang memiliki perlakuan yang berbeda, Kieso dan Weygandt (2010:9) berpendapat:

a. Metode persentase penyelesaian.

Pendapatan dan laba kotor diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi ditambah laba kotor yang dihasilkan sampai hari ini diakumulasikan dalam sebuah akun persediaan (konstruksi dalam proses) dan termin diakumulasikan dalam akun kontrak persediaan (tagihan dalam proses) dan termin diakumulasikan dalam akun kontra persediaan (tagihan atas konstruksi proses).

b. Metode Kontrak Selesai.

Pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat kontrak diselesaikan. Biaya konstruksi diakumulasikan dalam suatu akun persediaan (konstruksi dalam proses) dan termin diakumulasi dalam akun kontrak persediaan

(tagihan atas konstruksi proses). Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima perusahaan dikurang jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperoleh perusahaan.

Menurut PSAK No. 34 Standar Akuntansi Keuangan secara khusus mengatur tentang pengakuan pendapatan dan biaya kontrak dengan menerbitkan sebuah pernyataan PSAK No. 34 tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi. Tujuan PSAK No. 34 adalah untuk menggambarkan perlakuan akuntansi pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kontrak konstruksi. Oleh karena sifat dari aktivitas yang dilakukan pada kontrak konstruksi, tanggal saat aktivitas pada kontrak mulai dilakukan dan tanggal saat aktivitas tersebut diselesaikan biasanya jatuh pada periode akuntansi yang berlainan. Oleh karena itu, persoalan utama dari akuntansi kontrak konstruksi adalah alokasi pendapatan kontrak dan biaya kontrak pada periode dimana pekerjaan konstruksi tersebut dilaksanakan. Pernyataan ini menggunakan kriteria pengakuan yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan untuk menentukan kapan pendapatan dan biaya suatu kontrak konstruksi diakui sebagai pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi komprehensif. Pedoman ini juga menyediakan pedoman pelaksanaan penerapan kriteria tersebut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:34) tentang pengungkapan pendapatan konstruksi adalah: Perusahaan Harus Mengungkapkan:

- a. Jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan dalam periode berjalan;
- b. Metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui dalam periode;
- c. Metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak.

Perusahaan harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk pekerjaan dalam proses penyelesaian pada tanggal neraca:

- a. Jumlah akumulasi biaya yang terjadi dan laba yang diakui (dikurangi kerugian yang diakui) sampai tanggal neraca.
 - b. Jumlah uang muka yang diterima
 - c. Jumlah Retensi.
- Perusahaan harus menyajikan:
- a. Jumlah tagihan bruto kepada pemberi kerja sebagai asset
 - b. Jumlah utang bruto kepada pemberi kerja sebagai kewajiban.

Dalam kontrak konstruksi, jangka waktu penyelesaian dari suatu kontrak mungkin meliputi dua atau lebih periode akuntansi. Sedangkan laporan keuangan dibutuhkan untuk setiap periode akuntansi, bahkan dibutuhkan laporan keuangan dengan interval waktu yang lebih singkat, misalnya laporan keuangan interim untuk memenuhi kebutuhan informasi penggunanya dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu yang menjadi persoalan utama dalam akuntansi kontrak konstruksi adalah lokasi pendapatan kontrak dan biaya kontrak pada periode dimana pekerjaan konstruksi tersebut dilaksanakan. Apabila salah dalam menentukan saat pengakuan pendapatan, maka akan berakibat pada salahnya total pendapatan yang disajikan dalam laporan laba rugi. Kesalahan tersebut berupa berpindahnya pendapatan suatu periode menjadi pendapatan pada periode lainnya.

Ikatan Akuntan Indonesia (2010:34.20) juga menyatakan mengenai pengakuan pendapatan dan biaya kontrak bahwa :

“Bila hasil (*outcome*) kontrak konstruksi dapat diestimasi secara handal, pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi harus diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal neraca (*percentage of completion*)”. Pendapatan kontrak konstruksi dapat diakui bila kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal dan dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak.”

Pada umumnya jenis kontrak yang terjadi bila dipandang dari segi waktu pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu kontrak jangka panjang

dan kontrak jangka pendek. Untuk kontrak jangka pendek, pada umumnya perusahaan tidak menemui kendala dalam mengakui jumlah pendapatan yang diperoleh karena umumnya penyelesaian pekerjaan tersebut akan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat atau dalam satu periode kegiatan.

7. Pengertian Beban

Biaya (*cost*) adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang dan jasa yang diharapkan memberi manfaat pada saat ini atau di masa yang akan datang. Sedangkan Beban (*expense*) adalah biaya yang sudah dipakai atau digunakan (*expired cost*). Definisi beban menurut Usry (2013:40) adalah sebagai berikut: Beban adalah pengurangan aktiva netto akibat digunakannya jasa-jasa ekonomis untuk menciptakan pendapatan atau karena pengenaan pajak oleh badan-badan pemerintah, dalam arti luas beban mencakup semua biaya yang telah habis dipakai (*expired*) yang dapat dikurangkan dari pendapatan.

Sedangkan pengertian menurut Mulyadi (2012:48) adalah sebagai berikut: Biaya merupakan objek yang dicatat, digolongkan, diringkaskan, dan disajikan oleh akuntansi biaya, dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber-sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan ekonomi.

Menurut Hendriksen (2009:62) mendefinisikan beban adalah: Beban adalah penggunaan atau pemakaian barang dan jasa dalam proses mendapatkan pendapatan. Menurut Suwarjono (2011:10) menyatakan:

“Biaya adalah sebagai nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Sebaliknya beban adalah penurunan dalam aktiva bersih sebagai akibat dari penggunaan jasa ekonomis dalam menciptakan pendapatan atau pengenaan pajak oleh badan pemerintahan. Beban dalam

arti luas termasuk semua biaya yang sudah habis masa berlakunya yang dapat dikurangkan dari pendapatan.”

Dari kesemua pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara beban dan biaya adalah:

- a. Biaya adalah nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan, untuk memperoleh manfaat, sedangkan beban adalah penurunan dalam aktiva bersih sebagai akibat dari penggunaan jasa ekonomis dalam menciptakan pendapatan atau pengenaan pajak oleh badan pemerintah.
- b. Biaya memberikan manfaat dimasa yang akan datang, sedangkan beban sudah tidak mempunyai manfaat lagi dimasa yang akan datang.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:14) adalah:

“Beban mencakup baik kerugian maupun biaya yang timbul akibat pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang biasa timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan antara lain meliputi misalnya beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban biasanya berbentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas atau setara kas, persediaan atau aktiva tetap. Sementara itu kerugian akan mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin dari aktivitas perusahaan yang biasa. Kerugian merupakan manfaat ekonomis yang pada dasarnya sama dengan beban yang lain.”

8. Jenis-Jenis Beban

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:34.15-17) biaya kontrak konstruksi terdiri atas:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak tertentu. Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak pada umumnya dan dapat dialokasikan ke kontrak tersebut.
- b. Biaya lain yang secara khusus dapat ditagihkan ke pemberi kerja sesuai dengan isi kontrak.
 - 1). Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak tertentu, tetapi tidak terbatas pada:
 - (a). Biaya pekerjaan lapangan termasuk penyelia.
 - (b). Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi.

- (c). Penyusutan sarana dari peralatan yang digunakan dalam kontrak tersebut.
 - (d). Biaya penyewa sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan kelokasi pelaksanaan kontrak.
 - (e). Biaya penyewaan sarana dan peralatan.
 - (f). Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan kontrak tersebut.
 - (g). Estimasi biaya pembetulan dan biaya lain yang mungkin timbul selama masa jaminan.
 - (h). Klaim dari pihak ketiga.
- 2). Biaya-biaya yang dapat dikontribusikan pada aktivitas kontrak pada umumnya dapat dialokasikan ke kontrak tersebut yang meliputi:
- 1) Asuransi
 - 2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung tidak berhubungan dengan kontrak tertentu.
 - 3) Biaya overhead konstruksi
- 3). Biaya lain yang secara khusus dapat ditagihkan kepada pemberi kerja sesuai kontrak.

Menurut Prianthara (2010:113) untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, biaya dikorbankan berbeda dengan perusahaan industri, biaya yang dapat terjadi adalah sebagai berikut:

- a. *Sun cost* yaitu biaya yang sudah dikeluarkan diwaktu yang lampau untuk suatu proyek, atau biaya yang sudah dikeluarkan sebelum diambil keputusan untuk menjalankan proyek.
- b. Biaya penyusutan atau depresiasi
- c. Pelunasan utang beserta bunganya
- d. Biaya konstruksi/pengadaan peralatan yang terdiri atas peralatan dan bahan baku serta tenaga kerja
- e. Bunga selama masa konstruksi
- f. Biaya operasi dan pemeliharaan
- g. Biaya pembaharuan/penggantian
- h. *Contingencies* (biaya tak terduga)
- i. *Intangible costs*.

Sehubungan dengan biaya pada perusahaan konstruksi, terdapat biaya bersama yang perlu dialokasikan kedalam harga pokok proyek yaitu biaya penyusutan. Biaya bersama dapat diartikan: Biaya overhead bersama (*joint overhead cost*) yang harus dialokasikan ke berbagai departemen baik dalam perusahaan yang operasinya berdasarkan pesanan (*job order*) maupun bersifat

kontinyu. Dalam mendistribusikan biaya overhead harus divari dasar pendistribusian yang cocok.

9. Pengakuan dan Pengukuran Beban

Beban didefinisikan sebagai pengurangan dari aktiva bersih, maka alat ukur yang logis yang dapat dipergunakan adalah nilai barang dan jasa pada waktu yang dipergunakan dalam operasi perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:34.7-38.8), dinyatakan bahwa ada lima cara pengakuan beban, yaitu:

- a. Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan modal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan kenaikan kewajiban dan atau penurunan aktiva.
- b. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara beban yang timbul dan pos penghasilan tertentu diperoleh. Proses ini biasanya tersebut dengan pengaitan pendapatan dan beban (*matching cost/expense with revenue*)
- c. Kalau manfaat ekonomi diharapkan timbul selain beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi rasional dan sistematis. Hal ini sering terjadi dalam penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tetap tidak berwujud.
- d. Beban segera diakui dalam laporan rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat atau tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui.
- e. Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aktiva, seperti timbulnya kewajiban akibat garansi produk.

Pengukuran beban dapat diukur berdasarkan:

- a. Biaya historis (*historical cost*) Biaya historis dianggap *verifiable* karena *historical* menggambarkan pengeluaran kas yang sebenarnya. Disamping itu *historical cost* mempunyai kelemahan yaitu tidak menggambarkan pengukuran yang relevan mengenai barang dan jasa bagi pemakai laporan keuangan eksternal.

b. Harga berlaku (*current price*) Beban diukur berdasarkan harga berlaku dari barang atau jasa yang digunakan atau dihabiskan. Metode ini memiliki keuntungan karena membedakan:

- 1). Laba yang timbul dari transaksi
- 2). Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penyimpangan aktiva sebelum dipakai.

Alasan utama menggunakan dasar pengukuran biaya historis karena biaya historis diasumsikan dapat diverifikasi dan menggambarkan biaya tunai perusahaan. Biaya historis juga dapat menunjukkan nilai tukar barang dan jasa saat diperoleh perusahaan.

10. Prinsip Mempertimbangkan Pendapatan dan Beban Pendapatan

yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan dalam periode akuntansi tertentu sebaiknya dipertemukan secara layak agar memungkinkan hasil usaha yang wajar. Agar pendapatan dan beban dapat dipertemukan secara layak, terlebih dahulu harus mengetahui maksud dari prinsip mempertemukan pendapatan dan beban biaya (*matching cost against revenue principle*). Baridwan (2010:31-32) menyatakan sebagai berikut:

- a. Prinsip mempertemukan adalah mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip berguna menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode. Peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan modal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan kenaikan kewajiban dan atau penurunan aktiva.
- b. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara beban yang timbul dan pos penghasilan tertentu diperoleh. Proses ini biasanya tersebut dengan pengaitan pendapatan dan beban (*matching cost against revenue principle*).
- c. Kalau manfaat ekonomi diharapkan timbul selain beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung, beban diakui dalam laporan laba rugi atas

dasar prosedur alokasi rasional dan sistematis. Hal ini sering terjadi dalam penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tetap tidak berwujud.

- d. Beban segera diakui dalam laporan rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat atau tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui.
- e. Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aktiva, seperti timbulnya kewajiban akibat garansi produk

11. Masalah Pisah Batas (*Cut Off*)

Dalam penyusunan laporan laba rugi yang harus diperhatikan adalah memastikan semua pendapatan ataupun beban yang dilaporkan adalah benar-benar merupakan pendapatan ataupun beban dalam periode yang bersangkutan. Untuk itu perlu menetapkan dua titik waktu untuk memisahkan mana pendapatan ataupun beban yang termasuk dalam periode berjalan atau harus dikeluarkan dan dilaporkan dalam periode yang akan datang. Untuk keadaan-keadaan seperti di atas pada akhir periode perlu dibuatkan jurnal penyesuaian sehingga semua pendapatan ataupun beban untuk periode yang bersangkutan telah disajikan dalam laporan keuangan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

B. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah serta telaah pustaka yang telah diuraikan, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut : “Pengakuan pendapatan dan beban pada PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru dengan alamat Jalan Panglima Undan No. 91 Kampung Bandar Kecamatan Senapelan.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan data yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan proposal ini adalah :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa kebijakan-kebijakan perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan beban yang ada. Data ini diperoleh dari bagian akunting dan keuangan serta bagian-bagian lain yang berkompeten pada PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru.
2. Data Skunder yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan data dari perusahaan berupa surat kontrak pekerjaan proyek, laporan rugi laba, neraca, daftar aktiva dan penyusutan, struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang dalam perusahaan serta kegiatan atau aktivitas pada perusahaan ini yang diperoleh dari bagian administrasi dan keuangan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara yaitu tanya jawab dengan bagian administrasi dan keuangan serta pihak-pihak lain yang berkompeten mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Dokumentasi yaitu dengan memfotocopy dokumen atau laporan keuangan yang diterima dari Bagian Administrasi dan Keuangan PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru berupa surat kontrak pekerjaan proyek, Laporan Rugi Laba, Neraca, Rincian Aset tetap dan sebagainya.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu membandingkan antara data yang telah dikumpulkan dengan teori-teori yang relevan dan kemudian diambil atau ditarik suatu kesimpulan dan saran.



BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Umum Perusahaan

PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang kontraktor. PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru didirikan pada tanggal 23 Januari 2006 dihadapan Notaris Unang Tjemerlang, SH dengan Nomor Akte : 145 dengan pendiri awal Bapak Sarifuddin dan selanjutnya dilakukan perubahan akte pendirian dengan Nomor : 23 pada tanggal 21 April 2006 dihadapan notaris yang sama karena adan penambahan anggota komisaris/sekutu perusahaan yakni : 1. Bapak Amrizal Ali 2. Bapak Suryadi Muhammad Zein 3. Bapak Zulkifli Lubis Perusahaan ini berlokasi di Jalan Panglima Undan No. 91 Kampung Bandar Kecamatan Senapelan. Modal dasar perusahaan ini berjumlah Rp. 3.000.000.000. Adapun maksud dan tujuan perusahaan ini didirikan berdasarkan akte notaris tersebut di atas antara lain :

1. Menjalankan usaha dibidang perdagangan umum termasuk perdagangan untuk ekspor, impor maupun perdagangan lokal dan antar propinsi.
2. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang angkutan, diantaranya angkutan darat dengan menggunakan bus, mobil dan truk.
3. Menjalankan usaha di bidang keagenan, diantaranya dagang dan komisi atau sebagai leveransir atau penyalur chemical dan distributor bahan-bahan pokok kebutuhan rakyat, bahan-bahan bangunan dan alat-alat bangunan.

4. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, antara lain menjadi kontraktor pembangunan, perumahan, real estate, gedung-gedung, jalan dan jembatan, dermaga-dermaga, landasan, pengairan, sebagai developer, arsitektur, menjadi instalatur pemasangan instalasi listrik dan air, instalasi alat-alat pendingin ruangan dan alat-alat komunikasi.

B. Visi dan Misi

Berikut ini diuraikan mengenai PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru:

1. Visi Menjadi perusahaan kontraktor di bidang jasa konstruksi yang meliputi bidang perumahan, gedung, konstruksi baja dan jalan, interior serta developer dengan ditunjang total quality management yang memberikan *total quality services* bagi para pengguna jasa di seluruh Indonesia.
2. Misi PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru adalah :
 - a. Memberikan pelayanan, mutu, dan kepuasan yang terbaik kepada pelanggan.
 - b. Membangun serta menciptakan citra terbaik perusahaan.
 - c. Serta turut berpartisipasi dalam pembangunan negara Republik Indonesia.

C. Struktur Organisasi

Organisasi adalah suatu wadah yang didalamnya terdapat suatu sistem yang mengatur masalah pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing anggotanya. Struktur organisasi menunjukkan tanggung jawab dan pembagian wewenang (authority) dan hubungan antara bagian-bagian dalam perusahaan secara jelas. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas akan

tercipta suatu koordinasi kerja yang efektif yang mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Struktur organisasi suatu perusahaan dipengaruhi tujuan dan kegiatan operasi perusahaan. Organisasi timbul atau terjadi apabila dua orang atau lebih bersama-sama menjalankan pekerjaan untuk kepentingan bersama. Organisasi merupakan penggabungan manusia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan sebagai fungsi suatu proses merincikan tugas dan kewajiban serta memberikan pendelegasian kekuasaan dengan mengadakan kerjasama baik secara vertikal maupun horizontal.

Adapun struktur organisasi pada PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru adalah struktur organisasi yang mengikuti perkembangan usaha dengan melihat situasi dan keadaan dari perusahaan. Dalam hal pembagian tugas bukan saja perlu dilihat dari manfaat yang diperoleh tetapi juga dalam rangka mewujudkan penempatan orang yang tepat dalam rangka pengawasan dari atasan. Berikut ini penjelasan struktur organisasi pada PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru :

1. Direktur Membuat rencana kerja untuk kegiatan operasi perusahaan sesuai dengan garis kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komisaris, mengawasi dan mengevaluasi jalannya kegiatan operasi perusahaan dan kemudian mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Secara terperinci tugas dan tanggung jawab Direktur adalah :
 - a. Memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan secara keseluruhan sehingga semua kegiatan usaha dan pekerjaan tidak menyimpang dari tugas rutin yang telah ditentukan.
 - b. Menandatangani dan memberi persetujuan terhadap usulan kontrak dan surat penting menyangkut perusahaan.

- c. Mengkoordinir secara langsung seluruh kegiatan sehari-hari para staff.
- d. Menetapkan program kerja dan anggaran pembelanjaan perusahaan secara keseluruhan melalui masukan dan usukan para staff.
- e. Ikut serta dalam pengurusan dan berusaha untuk mendapatkan penawaran kerja.

2. Administrasi/Keuangan.

Bagian ini mengatur dan melaksanakan pemeriksaan catatan-catatan keuangan dan melaporkan posisi keuangan kepada Pimpinan/Atasan. Juga bertanggung jawab terhadap pembukuan keuangan dan menyediakan data mengenai kegiatan bidang keuangan dalam rangka menyusun laporan keuangan bagi pihak intern maupun ekstern perusahaan.

3. Ahli Sipil

- a. Bertanggungjawab kepada Direktur.
- b. Melaksanakan kegiatan atau proyek sipil seperti jalan, jembatan dan bangunan.

4. Drafter

- a. Melaksanakan kegiatan proyek perusahaan seperti perancangan atau desain bangunan
- b. Bertanggung jawab kepada Direktur

5. Team Leader

- a. Memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan secara keseluruhan sehingga semua kegiatan usaha dan pekerjaan tidak menyimpang dari tugas rutin yang telah ditentukan.

- b. Menandatangani dan memberi persetujuan terhadap usulan kontrak dan surat penting menyangkut perusahaan.
 - c. Mengkoordinir secara langsung seluruh kegiatan sehari-hari para staff.
 - d. Menetapkan program kerja dan anggaran pembelanjaan perusahaan secara keseluruhan melalui masukan dan usulan para staff.
 - e. Ikut serta dalam pengurusan dan berusaha untuk mendapatkan penawaran kerja
6. Pelaksana Lapangan Bertanggungjawab kepada team leader dalam pelaksanaan kegiatan atau proyek perusahaan di lapangan.

D. Aktivitas Perusahaan

Tujuan dan aktivitas didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi yang layak dan menguntungkan. Dalam hal ini usaha yang dipilih harus benar-benar memiliki peluang untuk dikembangkan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Adapun dalam akte notaris pendirian perusahaan dinyatakan bahwa maksud dan tujuan serta aktivitas usaha yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Maksud dan tujuan adalah berusaha dalam bidang perindustrian, kontraktor, perdagangan, pengadaan barang, jasa dan percetakan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Merencanakan, memborong dan mengerjakan pekerjaan bangunan termasuk pembuatan dan perbaikan gedung-gedung, jembatan-jembatan, saluran-saluran dan pemasangan instalasi listrik.

- b. Berdagang pada umumnya, baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi, termasuk perdagangan ekspor dan impor. Aktivitas utama PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru adalah bergerak dalam bidang jasa konstruksi untuk pembangunan jalan, jembatan, gedung dan lain-lain.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru. Berdasarkan data yang diperoleh, maka penulis akan mencoba menganalisa tentang Pengakuan Pendapatan dan Beban Pada PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru yang diterapkan oleh perusahaan. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan pada PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru adalah saat pekerjaan proyek konstruksi PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru didapat melalui tender atau lelang. Setelah memenangkan tender, antara kontraktor dengan pemberi kerja melakukan perjanjian kontrak kerja, seperti jangka waktu pelaksanaan, waktu dan cara pembayaran serta hal-hal lainnya. Dalam pengakuan pendapatannya, PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru menggunakan metode persentase penyelesaian yaitu pendapatan diakui sesuai dengan persentase kemajuan pekerjaan. Pembayaran atas selesainya pelaksanaan pekerjaan itu dilaksanakan berdasarkan angsuran tingkat kemajuan pekerjaan. Penyerahan angsuran dilakukan sesuai dengan kontrak perjanjian kerja yang telah ditanda tangani antara kontraktor dengan pemberi tugas.

Pada tanggal 21 November 2016 PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru menandatangani perjanjian dengan Dinas Pemukiman dan Prasarana Umum Kabupaten Indragiri Hilir dengan nomor kontrak : 0063/AIRM2/PPK-DPPU/XI/2016 untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan infrastruktur air minum wilayah III di Kabupaten Indragiri Hilir dengan lokasi Desa Tekluk Merbau Kecamatan Gaung, Desa Jaya Bakti Kecamatan Enok dan Desa Teluk Kiambang

Kecamatan Tempuling dengan nilai kontrak Rp. 1.360.238.000 termasuk PPN 10%. Waktu pelaksanaan pekerjaan 290 hari (mulai tanggal 21 November 2016 dan berakhir tanggal 15 Desember 2017). (Lampiran 13)

A. Pengakuan Pendapatan dan Beban Menurut Perusahaan

1. Pencatatan Pendapatan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan

a. Penerimaan Uang Muka

Berdasarkan surat perjanjian diketahui bahwa pada saat proyek akan dimulai, perusahaan menerima uang muka seminggu setelah pekerjaan mulai dilaksanakan dan perusahaan mengakui uang muka tersebut sebagai pendapatan. Pencatatan yang dilakukan perusahaan saat menerima uang muka pada tanggal 30 November 2016 sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.360.238.000 (Lampiran 8 dan 13). Perusahaan mencatat sebagai berikut :

| | |
|-------------------|-----------------|
| Kas | Rp. 272.047.600 |
| Pendapatan Proyek | Rp. 272.047.600 |

Perhitungan :

Rp. 1.360.238.000x 20% = Rp. 272.047.600 (Lampiran 18).

Dari pencatatan yang dilakukan perusahaan dapat diketahui bahwa uang muka yang diterima perusahaan diakui sebagai pendapatan proyek.

b. Pembayaran termin I

Pada saat pengajuan permohonan pembayaran termin I sebesar 30 % dari nilai kontrak yakni Rp. 408.071.400 pada tanggal 15 Desember 2016 (Lampiran 8 dan 14) perusahaan tidak melakukan pencatatan. Pencatatan yang dilakukan

ketika penerimaan termin I dengan bobot 25% tanggal 03 Januari 2017 (Lampiran 8 dan 19). pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah :

| | |
|---------------------|------------------|
| Kas | Rp. 265.246.100 |
| Potongan uang muka | Rp. 81.614.280, |
| PPN | Rp. 40.807.140 |
| PPh jasa konstruksi | Rp. 20.403.570 |
| Pendapatan Proyek | Rp. 408.071.400. |

Perhitungan :

Termin I (30 %) $Rp. 1.360.238.000 \times 30\% = Rp. 408.071.400$

Potongan :

PPN $Rp. 408.071.400 \times 10\% = Rp. 40.807.140$

PPh Jasa Konstruksi $Rp. 408.071.400 \times 5\% = Rp. 20.403.570$

Potongan Uang Muka $Rp. 272.047.600 \times 30\% = \underline{Rp. 81.614.280 +}$

Jumlah Potongan $Rp. 142.824.990$

Penerimaan Perkas $Rp. 265.246.410$

b. Pembayaran termin II

Pada saat pengajuan permohonan pembayaran termin II sebesar 30 % dari nilai kontrak yakni Rp. 408.071.400 pada tanggal 20 Maret 2017 (Lampiran 2 dan 15) perusahaan tidak melakukan pencatatan. Demikian juga dengan pencatatan untuk termin II dengan bobot 60% tanggal 5 April 2017, pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah :

| | |
|--------------------|-----------------|
| Kas | Rp. 265.246.100 |
| Potongan uang muka | Rp. 81.614.280, |
| PPN | Rp. 40.807.140 |

PPh jasa konstruksi Rp. 20.403.570

Pendapatan Proyek Rp. 408.071.400.

Perhitungan :

Termin I (30 %) Rp. 1.360.238.000x 30% = Rp. 408.071.400

Potongan :

PPN Rp. 408.071.400 x 10% = Rp. 40.807.140

PPh Jasa Konstruksi Rp. 408.071.400 x 5% = Rp. 20.403.570

Potongan Uang Muka Rp. 272.047.600x30% = Rp. 81.614.280 +

Jumlah Potongan Rp. 142.824.990

Penerimaan Perkas Rp. 265.246.410

c. Pembayaran termin III

Pada saat pengajuan permohonan pembayaran termin III sebesar 35 % dari nilai kontrak yakni Rp. 476.083.300 pada tanggal 28 Agustus 2017 (Lampiran 2 dan Lampiran 16) perusahaan tidak melakukan pencatatan. Saat penerimaan kas tanggal 14 September 2017, pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah :

Kas Rp. 305.454.145

Potongan uang muka Rp. 95.216.660

PPN Rp. 47.608.330

PPh jasa konstruksi Rp. 23.804.165

Pendapatan Proyek Rp. 476.083.300

Perhitungan :

Termin III (35 %) Rp. 1.360.238.000x 35% = Rp. 476.083.300

Potongan :

PPN Rp. 476.083.300 x 10% = Rp. 47.608.330

PPh Jasa Konstruksi Rp. 476.083.300 x 5% = Rp. 23.804.165

Potongan Uang Muka Rp. 272.047.600x35% = Rp. 95.216.660 +

Jumlah Potongan Rp. 166.629.155

Penerimaan Perkas Rp. 305.454.145

d. Pembayaran retensi/jaminan pemeliharaan (5%)

Untuk pencatatan pembayaran retensi yang diterima tanggal 14 November 2017, perusahaan mencatat sebagai berikut :

Kas Rp. 44.207.735

Potongan uang muka Rp. 13.602.390

PPN Rp. 6.801.190

PPh jasa konstruksi Rp. 3.400.595

Pendapatan Proyek Rp. 68.011.900

Perhitungan :

Retensi (5 %) Rp. 1.360.238.000x 5% = Rp. 68.011.900

Potongan :

PPN Rp. 68.011.900 x 10% = Rp. 6.801.190

PPh Jasa Konstruksi Rp. 68.011.900 x 5% = Rp. 3.400.595

Potongan Uang Muka Rp. 272.047.600x35% = Rp. 13.602.380 +

Jumlah Potongan Rp. 23.804.165

Penerimaan Perkas Rp. 44.207.735

e. Pencatatan Beban Yang Dilakukan Oleh Perusahaan

Beban merupakan bagian dari kelompok akun laba rugi (akun temporer).

Sebagian dari beban dikeluarkan pada suatu periode dan hanya memberikan

manfaat pada periode bersangkutan. Akan tetapi, terkadang beban merupakan alokasi biaya yang dimiliki suatu perusahaan dan pembayarannya telah dilakukan pada periode sebelumnya. Perusahaan tidak melakukan pengklasifikasian atas biaya yang ada dengan cara mendebetkan langsung item harga pokok pendapatan proyek. Komponen biaya dalam pelaksanaan proyek terdiri atas biaya material, biaya tenaga kerja dan biaya overhead proyek. Perusahaan juga memasukkan beban penyusutan pada tahun 2016 sebesar Rp. 151.999.400 (Lampiran 8) dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 140.265.000 (Lampiran 2) pada laporan keuangan dengan menjurnal pada debet beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan. Perusahaan menggabungkan peralatan dan mesin yang digunakan langsung dalam peralatan proyek dalam laporan keuangannya. Pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah :

Tahun 2016 :

| | |
|----------------------|-----------------|
| Beban Penyusutan | Rp. 151.999.400 |
| Akumulasi Penyusutan | Rp. 151.999.400 |

Tahun 2017 :

| | |
|----------------------|-----------------|
| Beban Penyusutan | Rp. 140.265.000 |
| Akumulasi Penyusutan | Rp. 140.265.000 |

Seharusnya biaya penyusutan peralatan dan mesin dimasukkan sebagai biaya overhead dalam perhitungan harga pokok pendapatan.

B. Pengakuan Pendapatan dan Beban Yang Seharusnya

1. Penerimaan Uang Muka

Pencatatan yang dilakukan perusahaan saat menerima uang muka pada tanggal 30 November 2016 sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.360.238.000. Seharusnya pencatatan yang dilakukan sebagai berikut :

| | |
|-----------|-----------------|
| Kas | Rp. 272.047.600 |
| Uang Muka | Rp. 272.047.600 |

Perhitungan :

Rp. 1.360.238.000x 20% = Rp. 272.047.600

Dan pada saat pekerjaan telah dilakukan maka dibuat jurnal penyesuaian:

| | |
|-------------------|-----------------|
| Uang Muka | Rp. 272.047.600 |
| Pendapatan Proyek | Rp. 272.047.600 |

Dari pencatatan ini maka uang muka belum diakui sebagaimana mestinya. Akibat kesalahan pencatatan yang dilakukan perusahaan maka perlu dilakukan jurnal koreksi. Jurnal koreksi yang perlu dilakukan adalah :

| | |
|-------------------|-----------------|
| Pendapatan Proyek | Rp. 272.047.600 |
| Uang Muka | Rp. 272.047.600 |

2. Pembayaran termin I

Selanjutnya termin diterima berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan yang telah dilaksanakan. Pada saat pengajuan permohonan pembayaran termin I sebesar 30 % dari nilai kontrak yakni Rp. 408.071.400 pada tanggal 15 Desember 2016 (Lampiran 14), pencatatan seharusnya adalah :

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Piutang Usaha | Rp. 265.246.100 |
| Pengajuan Kemajuan Faktur Kontrak | Rp. 408.071.400. |

Saat penerimaan kas, pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan adalah :

| | |
|---------------------|------------------|
| Kas | Rp. 265.246.100 |
| Potongan uang muka | Rp. 81.614.280, |
| PPN | Rp. 40.807.140 |
| PPH jasa konstruksi | Rp. 20.403.570 |
| Piutang Usaha | Rp. 408.071.400. |

Perhitungan :

Termin I (30 %) $Rp. 1.360.238.000 \times 30\% = Rp. 408.071.400$

Potongan :

PPN $Rp. 408.071.400 \times 10\% = Rp. 40.807.140$

PPH Jasa Konstruksi $Rp. 408.071.400 \times 5\% = Rp. 20.403.570$

Potongan Uang Muka $Rp. 272.047.600 \times 30\% = \underline{Rp. 81.614.280} +$

Jumlah Potongan $Rp. 142.824.990$

Penerimaan Perkas $Rp. 265.246.410$

3. Pada tanggal 31 Desember 2016

Seharusnya perusahaan melakukan cut off (pisah batas) Pada akhir periode diasumsikan untuk pendapatan yang seharusnya diterima atas pekerjaan yang telah diselesaikan dari tanggal 30 November 2016 sampai tanggal 31 Desember 2016 yang diperkirakan persentase kemajuan proyek sebesar 39%. Berarti pendapatan yang tidak diakui dan yang masih harus diakui perusahaan untuk tahun 2016 tersebut adalah selama rentang waktu setelah tercapai persentase termin I sampai 31 Desember 2016 yaitu sebesar 9% (39% - 30%). Pencatatan

dari tanggal 15 Desember 2016 sampai 31 Desember 2016 untuk progres fisik yang selesai sebesar 9% dari pekerjaan proyek dicatat sebagai berikut:

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Piutang | Rp. 79.573.923 |
| Potongan uang muka | Rp. 24.484.284 |
| PPN | Rp. 12.242.142 |
| PPh jasa konstruksi | Rp. 6.121.071 |
| Pengajuan Kemajuan Faktur Kontrak | Rp. 79.573.923 |

Perhitungan :

Nilai Kontrak (9 %) $Rp. 1.360.238.000 \times 9\% = Rp. 122.421.420$

Potongan :

PPN $Rp. 122.421.420 \times 10\% = Rp. 12.242.142$

PPh Jasa Konstruksi $Rp. 122.421.420 \times 5\% = Rp. 6.121.071$

Potongan Uang Muka $Rp. 272.047.600 \times 9\% = \underline{Rp. 24.484.284 +}$

Jumlah Potongan Rp. 42.847.497

Penerimaan Perkas Rp. 79.573.923

Akibat kesalahan pencatatan yang dilakukan perusahaan maka perlu dilakukan jurnal koreksi. Jurnal Koreksi pada tahun berjalan:

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Pengajuan Kemajuan Faktur Kontrak | Rp. 79.573.923 |
| Pendapatan Proyek | Rp. 79.573.923 |

Jurnal Koreksi setelah tutup buku:

| | |
|---------------------|----------------|
| Piutang | Rp. 79.573.923 |
| Potongan uang muka | Rp. 24.484.284 |
| PPN | Rp. 12.242.142 |
| PPh jasa konstruksi | Rp. 6.121.071 |

Laba Ditahan

Rp. 79.573.923

4. Pembayaran termin II

Pada saat pengajuan permohonan pembayaran termin II sebesar 30 % dari nilai kontrak yakni Rp. 408.071.400 pada tanggal 20 Maret 2017 (Lampiran 15), pencatatan seharusnya adalah :

Piutang Usaha Rp. 408.071.400

Pengajuan Kemajuan Faktur Kontrak Rp. 408.071.400.

Saat penerimaan kas, pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan adalah :

Kas Rp. 265.246.100

Potongan uang muka Rp. 81.614.280

PPN Rp. 40.807.140

PPh jasa konstruksi Rp. 20.403.570

Piutang Usaha Rp. 408.071.400.

Perhitungan :

Termin I (30 %) $\text{Rp. } 1.360.238.000 \times 30\% = \text{Rp. } 408.071.400$

Potongan :

PPN $\text{Rp. } 408.071.400 \times 10\% = \text{Rp. } 40.807.140$ PPh Jasa Konstruksi $\text{Rp. } 408.071.400 \times 5\% = \text{Rp. } 20.403.570$ Potongan Uang Muka $\text{Rp. } 272.047.600 \times 30\% = \underline{\text{Rp. } 81.614.280} +$

Jumlah Potongan Rp. 142.824.990

Penerimaan Perkas Rp. 265.246.410

5. Pembayaran termin III

Pada saat pengajuan permohonan pembayaran termin III sebesar 35 % dari nilai kontrak yakni Rp. 476.083.300 pada tanggal 28 Agustus 2017 (Lampiran 16) seharusnya pencatatan yang dilakukan :

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Piutang Usaha | Rp. 476.083.300 |
| Pengajuan Kemajuan Faktur Kontrak | Rp. 476.083.300. |

Saat penerimaan kas tanggal 14 September 2017, pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan adalah :

| | |
|---------------------|-----------------|
| Kas | Rp. 305.454.145 |
| Potongan uang muka | Rp. 95.216.660 |
| PPN | Rp. 47.608.330 |
| PPh jasa konstruksi | Rp. 23.804.165 |
| Piutang Usaha | Rp. 476.083.300 |

Perhitungan :

Termin III (35 %) $\text{Rp. } 1.360.238.000 \times 35\% = \text{Rp. } 476.083.300$

Potongan :

PPN $\text{Rp. } 476.083.300 \times 10\% = \text{Rp. } 47.608.330$

PPh Jasa Konstruksi $\text{Rp. } 476.083.300 \times 5\% = \text{Rp. } 23.804.165$

Potongan Uang Muka $\text{Rp. } 272.047.600 \times 35\% = \underline{\text{Rp. } 95.216.660 +}$

Jumlah Potongan Rp. 166.629.155

Penerimaan Perkas Rp. 305.454.145

6. Pembayaran retensi/jaminan pemeliharaan (5%)

Untuk pencatatan pembayaran retensi yang diterima tanggal 14 November 2017, perusahaan mencatat sebagai berikut :

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Kas | Rp. 44.207.735 |
| Potongan uang muka | Rp. 13.602.390 |
| PPN | Rp. 6.801.190 |
| PPh jasa konstruksi | Rp. 3.400.595 |
| Pendapatan Proyek | Rp. 68.011.900 |
| Perhitungan : | |
| Retensi (5 %) | Rp. 1.360.238.000x 5% = Rp. 68.011.900 |
| Potongan : | |
| PPN | Rp. 68.011.900 x 10% = Rp. 6.801.190 |
| PPh Jasa Konstruksi | Rp. 68.011.900 x 5% = Rp. 3.400.595 |
| Potongan Uang Muka | Rp. 272.047.600x35% = <u>Rp. 13.602.380 +</u> |
| Jumlah Potongan | Rp. 23.804.165 |
| Penerimaan Perkas | Rp. 44.207.735 |

B. Pengakuan Pendapatan dan Beban Yang Seharusnya

Pada Akhir Periode Pengakuan Pendapatan dan Beban Perusahaan tidak melakukan penyesuaian terhadap pendapatan yang seharusnya diterima dari tanggal 21 November 2016 sampai tanggal 31 Desember 2016, sehingga pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan 2016 terlalu kecil. Atas kejadian ini maka perusahaan harus melakukan penyesuaian, maka pendapatan yang harus diakui pada periode dimana terjadinya pendapatan tersebut diketahui

secara akurat sehingga tidak menimbulkan keraguan dan konsep pengakuan pendapatan serta metode yang diterapkan perusahaan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan No. 34 Tentang Kontrak Konstruksi. Apabila pencatatan yang dilakukan perusahaan tidak dilakukan penyesuaian maka menyebabkan aktiva lancar berupa pendapatan proyek yang masih harus diterima (piutang kontrak) terlalu rendah.

Pencatatan Seharusnya:

1. Mencatat Beban Pada Akhir Periode tahun 2016:

Adapun biaya yang dikeluarkan pada akhir periode tahun 2016 sebesar Rp. 42.580.000. Pencatatan yang harus dilakukan adalah :

Bangunan dalam pelaksanaan Rp. 42.580.000

Bahan-bahan, kas dan sebagainya Rp. 42.580.000

2. Mencatat Beban Pada Akhir Periode tahun 2016:

Pengakuan Pendapatan dan beban pada akhir periode tahun 2016:

Beban Konstruksi Rp. 42.580.000

Bangunan dalam pelaksanaan Rp. 36.993.923

Pendapatan dari Konstruksi Rp. 79.573.923

Akibat kesalahan pencatatan yang dilakukan perusahaan maka perlu dilakukan jurnal koreksi. Jurnal Koreksi yang perlu dilakukan adalah:

Bangunan dalam pelaksanaan Rp. 36.993.923

Laba Ditahan Rp. 36.993.923

3. Jurnal penyelesaian kontrak

Penagihan atas Bangunan dalam pelaksanaan Rp. 1.360.238.000

Bangunan dalam pelaksanaan

Rp. 1.360.238.000



BAB VI

PENUTUP

Dari uraian bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dan mencoba untuk memberikan saran-saran yang mungkin dapat dipergunakan oleh perusahaan dalam meningkatkan kegiatan usahanya.

A. Kesimpulan

1. Pada tanggal 21 November 2016 PT. Tritunggal Perkasa Pekanbaru menandatangani perjanjian dengan Dinas Pemukiman dan Prasarana Umum Kabupaten Indragiri Hilir dengan nomor kontrak : 0063/AIRM2/PPK-DPPU/XI/2016 untuk pelaksanaan pekerjaan peningkatan infrastruktur air minum wilayah III di Kabupaten Indragiri Hilir dengan lokasi Desa Tekluk Merbau Kecamatan Gaung, Desa Jaya Bakti Kecamatan Enok dan Desa Teluk Kiambang Kecamatan Tempuling dengan nilai kontrak Rp. 1.360.238.000 termasuk PPN 10%. Waktu pelaksanaan pekerjaan 290 hari. Pencatatan yang dilakukan perusahaan saat menerima uang muka dengan mendebet kas dan mengkreditkan pendapatan proyek.
2. Pada saat pengajuan permohonan pembayaran termin perusahaan tidak melakukan pencatatan. Saat penerimaan atau pembayaran kas, perusahaan baru melakukan pencatatan.
3. Pada tanggal 31 Desember 2016, perusahaan tidak membuat ayat jurnal penyesuaian berdasarkan kemajuan fisik pekerjaan pada periode tersebut. Perusahaan tidak melakukan *cut off* berkaitan dengan pendapatan yang

diterima pada periode tersebut yaitu pendapatan dari tanggal 15 Desember 2010 sampai tanggal 31 Desember 2016.

4. Perusahaan tidak melakukan pengklasifikasian atas biaya yang ada dengan cara mendebetkan langsung item harga pokok pendapatan proyek. Komponen biaya dalam pelaksanaan proyek terdiri atas biaya material, biaya tenaga kerja dan biaya overhead proyek. Perusahaan juga memasukkan beban penyusutan pada tahun 2016 sebesar Rp. 151.999.400 (Lampiran 8) dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 140.265.000 (Lampiran 2) pada laporan keuangan dengan menjurnal pada debet beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis akan mencoba mengemukakan beberapa saran yang sekiranya dapat dipertimbangkan dan menjadi masukan bagi manajemen perusahaan dalam menerapkan metode pengakuan pendapatan dan beban untuk kontrak jangka panjang, perusahaan seharusnya:

1. Secara benar dan konsekuen dalam menerapkan metode persentase penyelesaian, baik sebagai dasar penagihan termin maupun pengakuan pendapatan dan beban.
2. Melakukan pencatatan yang benar tentang uang muka yang diterima. Seharusnya perusahaan menyajikannya dikewajiban lancar.
3. Pada saat melakukan penagihan atas pekerjaan yang telah diselesaikan seharusnya perusahaan melakukan pencatatan, sehingga akan terlihat besarnya asset atau kewajiban yang timbul dalam pelaksanaan proyek tersebut.

4. Perusahaan seharusnya mengelompokkan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut kedalam harga proyek. Beban penyusutan peralatan dan kendaraan yang merupakan beban yang berhubungan langsung dengan proyek, seharusnya perusahaan mengalokasikannya kedalam harga pokok proyek.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2010. Akuntansi Keuangan. Edisi Kelima. Yogyakarta: BPFE.
- Belkaoui, A. R. 2010. Teori Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat
- Chariri, Anis. 2010. Teori Akuntansi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Dyckman, Thomas R., Roland E. Dukes, Charles J. Davis, 2010. Akuntansi Intermediate, Edisi Kesepuluh, Jilid I, Terjemahan Emil Salim. Jakarta: Erlangga
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali.
- Harnanto, 2010, Akuntansi Perpajakan, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Hendriksen Eldon S, 2009. Teori Akuntansi Buku Satu, Edisi kelima. Alih Bahasa Herman Wibowo. Jakarta: Interaksa.
- Jusup, Al. Haryono, 2010, Dasar-dasar Akuntansi, Edisi 6. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Kieso, Donald E. dan Jerry J. Weygandt. 2011. Akuntansi Intermediate. Jilid 3. Jakarta : Erlangga.
- Martani, Dwi dkk. 2016. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2012. Akuntansi Biaya, Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Pura, Rahman, 2013, Pengantar Akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Rudianto, 2014, Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Penerbit : Erlangga, Jakarta
- Smith, Jay M and K. Fred Skousen. 2012. Akuntansi Intermediate. Jilid 2. Edisi Kedelapan. Erlangga. Jakarta.
- Soemarso S.R, 2009, Akuntansi : Suatu Pengantar. Buku Satu Edisi Lima, Jakarta: Salemba Empat

Suardjono. 2015. Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE.

Usry, Millon F. 2013. Akuntansi Biaya. Jakarta: Salemba Empat.

Walter T, Harrison Jr., Horngren, C William Thomas, 2012, Akuntansi Keuangan, Edisi IFRS, Edisi Kedelapan, Jilid 2. Erlangga, Jakarta.

Warren, Carl, S., James M. Reeve, Philip E. Fess, 2014. Pengantar Akuntansi, Edisi 21, Cetakan 1, Buku 1, Penerjemah Aria Farahmita, Amanugrahani., dan Taufik Hendrawan, Salemba Empat, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2015. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

